



# SELAMAT HARI PERHUBUNGAN NASIONAL 2020



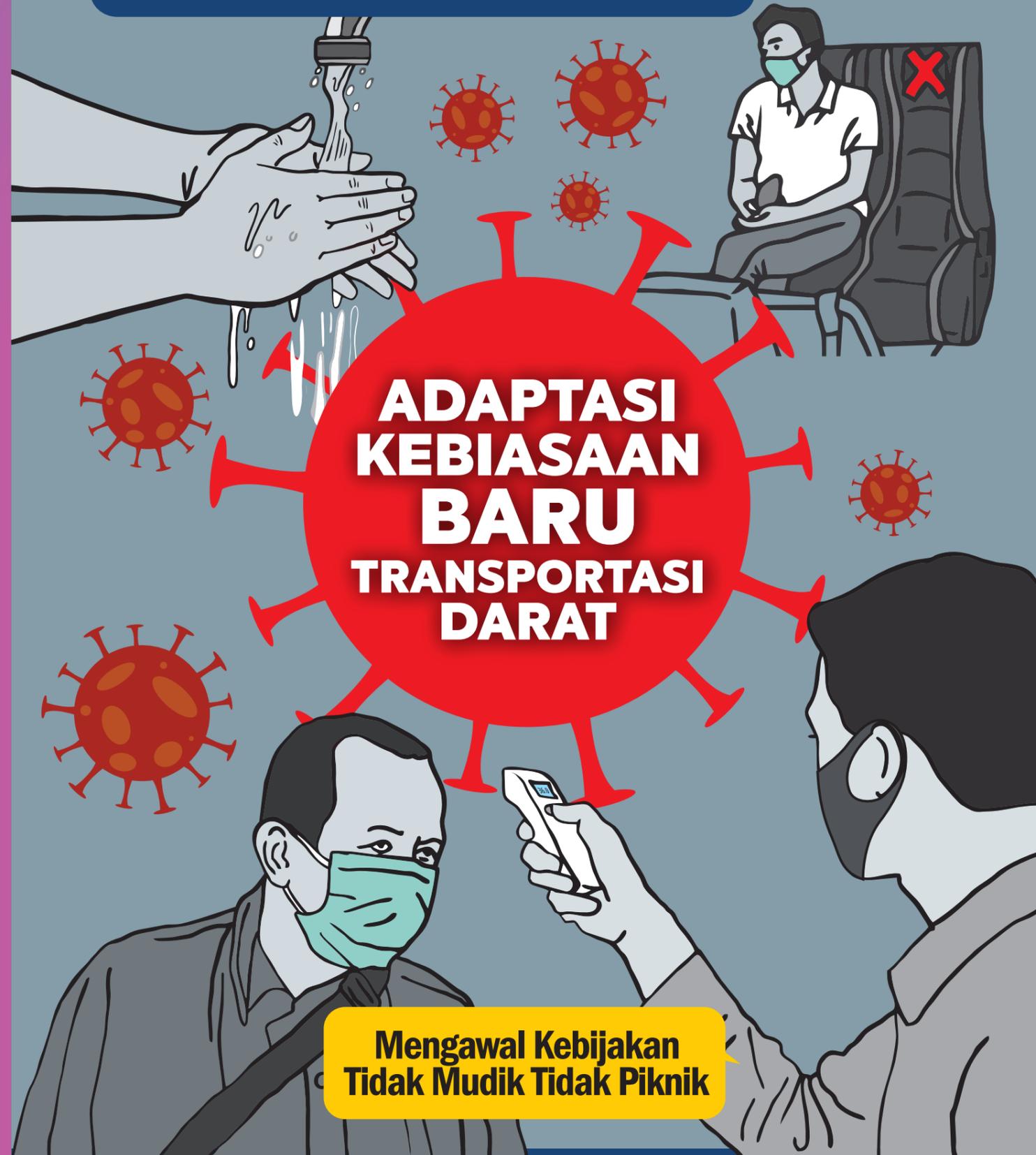
#transportasiamanproduktif  
#harhubnas2020



NEWSLETTER

# infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat



**Mengawal Kebijakan  
Tidak Mudik Tidak Piknik**

Pelayanan transportasi darat harus diikuti dengan pelaksanaan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Ingat selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.

**Budi Setiyadi**  
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, didampingi Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, dan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, melakukan sosialisasi SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) di perbatasan Karawang-Bekasi (26/5/2020). Foto: HMS DJPD/ABA



# WAJIB 3M

**MEMAKAI MASKER,  
MENJAGA JARAK,  
MENCUCI TANGAN**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Di tengah masa pandemi ini, kita bersua kembali melalui edisi kedua *Newsletter* infoHUBDAT. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dengan harapan hal ini dapat menjadi bahan catatan dan refleksi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.



Pembaca yang budiman, pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan justru di beberapa daerah angka pasien yang terkonfirmasi positif terus naik. Namun demikian pasien yang sembuh juga bertambah. Beberapa waktu lalu, pemerintah membatasi pergerakan masyarakat dengan kebijakan tidak mudik dan tidak piknik. Petugas gabungan dari berbagai unsur, baik dari perhubungan, TNI, Polri, Pol.PP, terjun ke lapangan di pos-pos penyekatan, check point pemeriksaan kendaraan, menghalau kendaraan yang akan mudik. Sepeda motor, mobil pribadi, mobil travel, mobil barang, bus, dan truk, tak luput dari pemeriksaan. Semua kendaraan yang terindikasi mudik dipaksa putar balik. Mau tidak mau, suka tidak suka, hal ini terpaksa dilakukan demi mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Peristiwa di tahun 2020 ini sungguh sebuah anomali. Jika pada tahun-tahun yang lalu pemerintah dengan segala daya upaya mewujudkan kelancaran arus mudik, maka tahun ini, pemerintah justru membatasi dengan ketat pergerakan arus mudik dan balik. Pemerintah juga memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah yang berada dalam zona merah. Kondisi ini membawa konsekuensi yang cukup besar di segala bidang kehidupan.

Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan masuk ke dalam era *new normal* atau kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, Indonesia harus produktif namun tetap aman dari Covid-19. Senada dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru, yang diutamakan adalah aspek kesehatan namun juga tetap memperhatikan aspek ekonomi. Untuk itu kita harus membangun transportasi yang lebih higienis dan humanis. Sejalan dengan itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 melalui SE 11 Tahun 2020. Diharapkan baik operator maupun masyarakat dapat menaatinya agar tetap selamat, aman, nyaman, dan juga memenuhi protokol kesehatan.

Akhir kata, pada kesempatan ini saya sampaikan himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jika keluar rumah, selalu kenakan masker, dan terapkan protokol kesehatan. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**



**Ilustrasi Cover:  
HMS DJPD/CAS**

*Physical Distancing* atau jaga jarak perlu diterapkan dalam transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

**PENANGGUNG JAWAB**  
Imran Rasyid

**REDAKTUR PELAKSANA**  
Endy Irawan

**REDAKTUR UTAMA**  
Pitra Setiawan  
Nanang Rahardjo  
Aznal

**REDAKTUR**  
Ardian Sukmaji  
Adi Prabowo  
Dinda Siahaan  
Hanna Suryadika

**DESAIN GRAFIS  
DAN FOTOGRAFI**  
Arif Pintoko  
M. Aulia Dharmas  
Herman Wibowo  
Andrew Bryan Agustinus

**SEKRETARIAT**  
Bejo Sri Wahono  
Ratna Syaka Aprilda  
Sari Hayu Hutami  
Ely Rusnita  
Nurhayati  
Yudha Kurniawan  
Kurniadi Zaini  
Didik Prasetyo  
Rifai Dyan Armananta  
Nolita  
Rusdinal  
Achmad Nanang  
Rosmala Damayanti  
Nova Yulianasari Sopiah  
M. Yunus  
Reza Saputra  
Nurfadilah Sinta Ningrum  
Ade Yunita

**KONTRIBUTOR**  
Junedi Sembiring  
Nurita Aprillaning Tyas  
Marisa  
Wahyu Arya Putra  
Prisca Magdalena Samosir  
Arief Eko Sumba  
Cristian Andri Mardhani  
Laurence  
Erlieka Affan  
Ririn Scorvianti  
Rinto Mahendra Raharjo



**Diterbitkan oleh:**

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  
Gedung Karya Lantai 9  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

Jakarta Pusat 10110  
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : [humas.hubdat@gmail.com](mailto:humas.hubdat@gmail.com)

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen\_hubdat

ditjen perhubungan darat

## Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Pandemi Corona belum usai. Kewaspadaan dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari harus tetap dijaga. Agar roda perekonomian terus bergulir, kegiatan masyarakat tak boleh terpenjara dalam jeruji pandemi. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa beraktivitas kembali meraih mimpi-mimpi yang sementara ini terhenti akibat pandemi. Kita semua harus beradaptasi pada kondisi ini. Di bidang transportasi, pemerintah telah mengatur regulasi mengenai bagaimana beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menampilkan Laporan Utama mengenai adaptasi kebiasaan baru dalam transportasi darat. Beberapa artikel telah kami siapkan untuk mendukung laporan utama. Diawali dengan judul besar Adaptasi Kebiasaan Baru Transportasi Darat. Artikel ini dilengkapi dengan sub-sub judul antara lain: Sistem Zonasi dan Batas Angkut Maksimum Selama Masa Adaptasi Kebiasaan Baru; Pengaturan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Selama New Normal dalam SE 11/2020. Selain itu ada juga artikel pendukung yaitu Penerapan Konsep dan Adaptasi Kebiasaan Baru; Layanan Transportasi di Era Kenormalan Baru; serta Transportasi dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Kemudian, kami sajikan pula uraian mengenai langkah-langkah mengawal kebijakan tidak mudik tidak piknik. Dalam rubrik info khusus, beberapa artikel kami sajikan, antara lain: Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Transportasi Selama Pandemi Covid-19; Menyelundupkan Pemudik, Puluhan Travel Gelap Terjaring Razia; Kelancaran Penyeberangan Logistik di Tengah Pandemi; serta *Rapid Test* Gratis Bagi Pengemudi Angkutan Umum.

Tak kalah menarik, tulisan mengenai *Buy The Service*, sebuah skema baru pelayanan angkutan umum, yang diikuti dengan laporan peluncuran aplikasi Teman Bus di Palembang.

Untuk mendukung sosialisasi Ferizy, kami hadirkan, tulisan tentang Ferizy, sistem tiket online angkutan penyeberangan. Aplikasi Ferizy dapat dengan mudah diakses melalui *smartphone*. Dengan membeli tiket penyeberangan secara online, berarti turut mencegah penyebaran Covid-19, karena tidak diperlukan interaksi fisik dengan petugas loket.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (\*)

# daftar isi

EDISI TRIWULAN 02 / 2020



**Jaga Jarak**  
Sejumlah pegawai Kementerian Kominfo duduk di dalam bus jemputan yang telah diatur jarak antar penumpang pada saat pulang kerja di jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Kamis (18/6/2020). Sesuai ketentuan dalam menerapkan ketentuan adaptasi kebiasaan baru, para penumpang menjaga jarak ketika memasuki kendaraan, mencuci tangan dengan perangkang yang disediakan dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Foto: Infopublik/Humas Kem. Kominfo/Agus YH/Agus s Budiawan

### Info Utama

04

#### Adaptasi Kebiasaan Baru Transportasi Darat

Untuk mengatur penyelenggaraan transportasi darat pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan SE Nomor 11/2020, membahas tentang pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat yang berlaku bagi sarana dan prasarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

9 Penerapan Konsep dan Adaptasi Kebiasaan Baru

10 Layanan Transportasi di Era Kenormalan Baru

14 Transportasi dan Adaptasi Kebiasaan Baru

### Info Khusus

16 Mengawal Kebijakan Tidak Mudik Tidak Piknik

19 Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Transportasi Selama Pandemi Covid-19

23 Menyelundupkan Pemudik, Puluhan Travel Gelap Terjaring Razia

24 Kelancaran Penyeberangan Logistik di Tengah Pandemi

25 Rapid Test Gratis Bagi Pengemudi Angkutan Umum

### Info Angkutan

26 *Buy The Service*, Skema Baru Pelayanan Angkutan Umum

30 Teman Bus Hadir di Palembang

30 Perisai Sebagai Sekat Penyelamat

### Info Sarana

34 Digitalisasi Buku Uji Kendaraan Bermotor dan *Big Data*

### Info TSDP

36 Ferizy, Sistem Tiket Online Angkutan Penyeberangan

### Info Prasarana

38 Peran Penting Penilaian Kerjasama Pemanfaatan Terminal Sukabumi



### Info Selintas

39

- Ditjen Hubdat Operasikan 1 Dermaga di Padangbai untuk Urai Antrean Kendaraan
- Pastikan Protokol Kesehatan, Dirjen Perhubungan Darat Tinjau Terminal Pulogebug
- Dirjen Hubdat Apresiasi Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Petugas Lintas Instansi
- Bantuan Masker dan Disinfektan dari Alfamart
- Kemhub Siapkan Regulasi untuk Mendukung Keselamatan Pesepeda
- Peluang dan Kondisi Transportasi dan Logistik Selama Pandemi
- Fasilitasi Kepulangan WNI, BPTD IV Riau Kepri Siapkan 4 Unit Bus
- Komisi V DPR-RI Dukung Kebijakan Pengendalian Transportasi Pada Masa Pandemi Covid-19

### Lensa Hubdat

43

Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

# ADAPTASI KEBIASAAN BARU TRANSPORTASI DARAT

Oleh: Tim infoHUBDAT

**Penumpang Angkutan Umum diimbau untuk tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat, juga menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*.**

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mempersiapkan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau *new normal*. Sebelumnya pada 8 Juni telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Khusus mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat, maka diterbitkan juga yakni Surat Edaran Nomor SE 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19.

“Dengan adanya PM 41/2020 tersebut, maka untuk mengatur penyelenggaraan transportasi darat pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru ini, diterbitkan

SE Nomor 11/2020 yang akan membahas lebih detil mengenai pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat. Dalam SE Nomor 11/2020 ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dan petugas untuk melindungi pengguna jasa dalam mencegah penyebaran Covid-19,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Budi menjelaskan bahwa dalam SE 11/2020 tersebut berlaku bagi sarana dan prasarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

“Sesuai dengan arahan Pak Menhub bahwa dalam masa sekarang ini maka aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali berjalan dan memungkinkan akan terjadi peningkatan perjalanan orang dengan transportasi. Maka melalui

SE 11/2020 ini diharapkan baik operator maupun masyarakat dapat menaatinya agar tetap aman, nyaman, selamat, dan juga memenuhi protokol kesehatan,” tambah Dirjen Budi.

Dalam SE 11/2020 tersebut dituliskan bahwa khusus untuk Perusahaan Angkutan Umum diwajibkan untuk:

1. mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 kali sehari;
2. menjual tiket secara daring (online) atau transaksi non tunai;
3. menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
4. memastikan penumpang dan awak kendaraan bermotor umum dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (*Rapid Test*);
5. memastikan awak kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan masker, sarung

tangan, jaket lengan panjang, *hand sanitizer*;

6. memastikan penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker;
7. memastikan penumpang dinyatakan sehat diperbolehkan masuk ke dalam kendaraan;
8. memastikan penerapan jaga jarak fisik;
9. menghimbau kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum.

“Sementara untuk Penumpang Angkutan Umum diimbau untuk tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat, juga menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan atau setidaknya pakai *hand sanitizer*. Dalam SE tersebut juga kami minta penumpang untuk menerapkan jaga jarak selama perjalanan dengan

kendaraan bermotor umum,” urai Dirjen Budi.

Untuk kendaraan bermotor perseorangan, bagi pengguna mobil dianjurkan untuk menyemprot disinfektan pada bagian luar dan interior kendaraan. Penumpang yang akan bepergian harus dalam kondisi sehat dan telah mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* serta tetap menerapkan jaga jarak fisik dan memakai masker. “Jika mobil digunakan bersama dengan orang lain yang berasal dari zona merah dan oranye maka maksimum kapasitasnya 50%. Sementara jika berasal dari zona kuning dan hijau, maksimal kapasitasnya 75%. Kapasitas 100% diizinkan bila mobil akan digunakan berasal dari rumah yang sama,” tambah Dirjen Budi.

Sementara bagi pengguna sepeda motor pribadi, harus melakukan penyemprotan disinfektan di sepeda motor dan mencuci tangan dengan *hand sanitizer*/

sabun. Sepeda motor dapat membawa penumpang bila berasal dari rumah yang sama namun sepeda motor hanya dapat digunakan untuk 1 orang dan tidak boleh membawa penumpang dari luar rumah jika untuk di zona merah dan zona oranye. Jika untuk zona kuning dan zona hijau maka sepeda motor dapat membawa penumpang yang berasal dari rumah yang berbeda.

Sedangkan ketentuan untuk ojek online atau yang dalam SE 11/2020 disebut sebagai Sepeda Motor Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi diimbau bagi Perusahaan Aplikasi agar menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, *hand sanitizer*, dan pengukur suhu. “Dalam aturan ini juga kami minta Perusahaan Aplikasi untuk menyediakan penyekat antara penumpang dan pengemudi serta menyediakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi. Meskipun demikian,



Bus TransJakarta melintasi papan imbauan pencegahan penyebaran virus korona di Jakarta, Rabu (1/4).

Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/315476-transjakarta-tetap-beroperasi-pada-hari-kerja-ini-rute-lengkapny>



Petugas mengecek suhu tubuh penumpang sebelum menaiki bus Transpatriot di Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/6/2020). Pemerintah setempat mengoperasikan kembali bus angkutan kota tersebut mulai (16/6) dengan penerapan protokol kesehatan dan kapasitas maksimal 20 orang. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.

penumpang disarankan membawa helm sendiri serta tetap melaksanakan protokol kesehatan lainnya. Untuk pengemudi harus menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan *hand sanitizer*,” jelas Dirjen Budi.

Pada Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), Terminal, dan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda secara umum petugas wajib menerapkan *physical distancing* serta menyediakan peralatan kesehatan seperti *thermal gun* yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh petugas maupun pengunjung serta menjaga kebersihan *hand sanitizer* atau sabun cuci tangan. “Untuk menjamin kesehatan di prasarana. Misalnya untuk petugas kami minta selain menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan juga harus dikenakan bila berhubungan langsung dengan masyarakat. Untuk di terminal bus pun pembelian tiket dianjurkan secara online ,” kata Dirjen Budi.

**Sistem Zonasi dan Batas Angkut Maksimum Selama Masa Adaptasi Kebiasaan Baru**

Dalam SE Nomor 11/2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi

Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19, ada 4 istilah zonasi yang digunakan dalam perlakuan pergerakan orang dan kendaraan dengan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru yakni Zona Merah, Oranye, Kuning, dan Hijau.

“Mengenai pergerakan orang dan kendaraan, dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini jika perjalanan dari zona yang berbeda maka harus mengikuti aturan dari zona yang terburuk. Misalnya dari zona hijau menuju ke zona merah, maka ketentuan yang berlaku adalah dengan zona merah. Jika dari zona oranye ke zona hijau pun yang berlaku adalah ketentuan zona oranye,” urai Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

Adapun pengertian dan ketentuan zona tersebut yakni:

- a. Zona merah: resiko tinggi, yaitu PSBB penyebaran virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru, masyarakat harus berada di rumah, perjalanan tidak diperbolehkan;
- b. Zona oranye: resiko sedang, yaitu PSBB resiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah terjadi dengan

cepat, kluster- kluster baru mungkin bisa dipantau dan dikontrol melalui testing dan *tracing* agresif, masyarakat disarankan tetap berada dirumah, *physical distancing* jika di luar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan;

- c. Zona kuning: resiko ringan, yaitu penyebaran terkontrol tetap ada kemungkinan transmisi lokal, transmisi lokal tingkat rumah tangga bisa terjadi, kluster penyebaran terpantau dan tidak bertambah, masyarakat bisa beraktifitas diluar rumah dengan protokol kesehatan, *physical distancing* jika di luar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan; dan/atau
- d. Zona hijau: aman, yaitu resiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus positif, penyebaran COVID-19 terkontrol, resiko penyebaran tetap ada di tempat-tempat isolasi, perjalanan diperbolehkan, *physical distancing*, aktifitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

“Selain itu dalam SE Nomor 11/2020 ini pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan trans-



Anggota Komisi D meminta salah satu warga di Terminal Purwodadi, Grobogan, untuk mengenakan masker, 30/6/2020. Foto: teguh prasetyo). Sumber: <https://dprd.jateng-prov.go.id>

portasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru akan dilakukan dengan 3 fase yang disebut fase I, fase II, fase III. Fase I merupakan pembatasan bersyarat, yaitu mulai tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020. Fase II merupakan masa pemulihan/penyebaran terkendali, yaitu mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020. Fase III merupakan normal baru yaitu mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020,” kata Dirjen Budi.

Terkait pembatasan jumlah penumpang, sistem zonasi ini berlaku pada angkutan umum seperti Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antarkota Antarprovinsi, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan Antarjempit Antarprovinsi, Angkutan Pariwisata jika berada pada zona merah masih dilarang beroperasi. Namun pada zona oranye, kuning, dan hijau maka dapat mengangkut dengan kapasitas penumpang 70% pada fase I dan II, serta pada fase III dapat beroperasi dengan kapasitas maksimum hingga 85%.

“Khusus angkutan karyawan, pada zona merah dan oranye hanya diperbolehkan mengangkut paling banyak 70% kapasitas pe-

numpong. Sementara pada zona kuning dan hijau untuk fase I dan II paling banyak 70% kapasitas penumpang dan fase III dengan kapasitas maksimum 85%,” ucap Dirjen Budi.

**Penumpang yang akan bepergian harus dalam kondisi sehat dan telah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer serta tetap menerapkan jaga jarak fisik dan memakai masker.**

Sementara pada Angkutan Taksi, Angkutan Sewa Khusus, maupun Angkutan Sewa Umum pada zona merah dan oranye dapat beroperasi dengan kapasitas penumpang 50%, sementara pada zona kuning dan hijau pada fase I dapat beroperasi dengan kapasitas maksimum 50%, sedangkan pada fase II dan III maksimum 75%. “Misalnya untuk kendaraan dengan kapasitas 5 tempat duduk hanya dapat diisi paling banyak 3 orang pe-

numpong. Dan kendaraan dengan kapasitas 7 atau 8 tempat duduk hanya dapat diisi paling banyak 4 orang penumpang. Kami juga menyarankan untuk menyediakan penyekat antara ruang pengemudi dan penumpang,” kata Dirjen Budi.

Selanjutnya dalam SE Nomor 11/2020 ini juga membahas ketentuan bagi ojek online. Dalam surat edaran tersebut dituliskan bahwa untuk sepeda motor berbasis aplikasi, pada zona merah dan oranye hanya diperbolehkan mengangkut barang. Sedangkan pada zona kuning dan hijau, diizinkan membawa penumpang namun dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan. “Diizinkan hanya saja pengemudi dan penumpang harus mematuhi beberapa hal. Misalnya pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, hand sanitizer, jaket. Kami juga menyarankan untuk menyediakan penyekat antara pengemudi dan penumpang. Dalam kondisi ini, sebaiknya penumpang disarankan membawa helm sendiri atau mengenakan *hair cap* bila helm dari pengemudi. Penumpang juga harus menggunakan masker selama berkendara,” pungkaskan Dirjen Budi.

## Pre Journey & On Journey

### Protokol Kesehatan di Kapal & Pelabuhan



**Memakai Masker**



**Melakukan Physical Distancing**  
Minimal 1 meter



**Cek Suhu Tubuh**  
Suhu tubuh <math>37,3^{\circ}\text{C}</math> atau lebih  
suhu <math>37,3^{\circ}\text{C}</math> atau lebih



**Mencuci Tangan**  
SABUN & AIR



Kapasitas maksimal penumpang di dalam kapal hanya **50%**

Beberapa protokol kesehatan di pelabuhan dan di dalam kapal yang wajib diterapkan oleh semua Pengguna Jasa ketika akan memulai perjalanan (Pre Journey), dan selama di perjalanan (On Journey). Sumber: akun twitter PT. ASDP Indonesia Ferry @asdp191

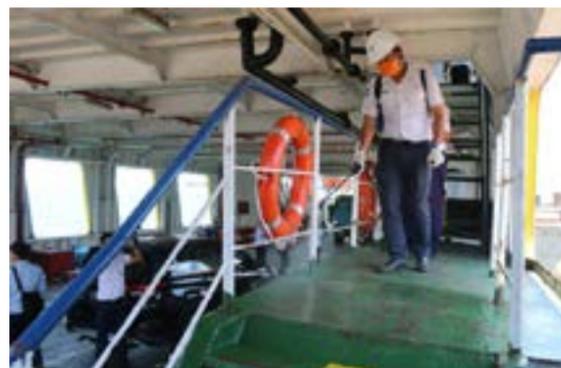
#### Pengaturan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Selama New Normal dalam SE 11/2020

“Untuk transportasi sungai, danau, dan penyeberangan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang angkutan jalan. Kami minta petugas di pelabuhan dan kapal untuk mengenakan masker, sarung tangan, dan *face shield* sesuai protokol kesehatan, begitu pula dengan penumpang wajib mengenakan masker. Di dalam kapal maupun pelabuhan harus ada informasi dan iumbauan terkini tentang Covid-19. Selain itu, kebersihan kapal harus terjaga dan kapal maupun pelabuhan harus disemprot disinfektan secara berkala. Semua peralatan seperti sabun pembersih, air bersih, maupun hand sanitizer juga harus tersedia di tempat yang mudah dijangkau sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu,” demikian dijabarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Rabu (10/6).

Di Pelabuhan Penyeberangan, dalam SE Nomor 11/2020 diwajibkan tersedianya posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis dan telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 terdekat.

Dalam surat edaran tersebut juga tertulis bahwa petugas pemuatan harus melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan memastikan penggunaan masker terhadap sopir/kondektur maupun penumpang dalam kendaraan dan pejalan kaki sebelum memasuki kapal. Saat di dalam kapal, kondisi seluruh awak kapal haruslah sehat dan menerapkan jaga jarak.

“Bagi penumpang, juga wajib menjaga jarak minimal 1 meter dan harus menggunakan masker. Jadi setiap penumpang harus mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan sesuai arahan dari petugas. Selain itu untuk meminimalisir kontak langsung, penumpang dapat melakukan pembelian tiket secara daring,



kecuali untuk penumpang pejalan kaki, penumpang sepeda motor dan penumpang dalam kendaraan dapat melakukan pembelian tiket di pelabuhan untuk wilayah selain zona hijau,” jelasnya.

Sementara itu, untuk ketentuan kapasitas penumpang pada transportasi sungai, danau, dan penyeberangan pada zona merah hanya dapat beroperasi dengan kapasitas penumpang 50%, zona oranye 60%, zona kuning 75%, dan zona hijau 85%. Pada keempat zona tersebut kapal dan dermaga yang beroperasi akan sesuai jadwal serta tidak ada pembatasan pada kendaraan barang.(\*)



Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis DAMRI, Sandry Pasambuna dan Direktur Teknik & Fasilitas DAMRI, Arifin beserta jajaran Kepala Divisi DAMRI meninjau langsung penerapan protokol kesehatan dalam masa transisi new normal di Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta, Kantor DAMRI Logistik, Kantor Cabang Jakarta, Kantor SBU Transjakarta Busway Koridor 1 & 8 dan Kantor Divisi Regional 1. Rabu, 17/6/2020. Sumber: damri.co.id

## PENERAPAN KONSEP ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mempersiapkan beberapa hal selama masa new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Jumat (26/6), Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan bahwa untuk sektor transportasi darat akan berpedoman pada Surat Edaran Nomor SE 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang

ada beberapa permasalahan yang mungkin saya dapat di lapangan. Dari sektor darat ini jumlah operator dan asosiasinya banyak, semuanya memang sudah setuju untuk mendukung pelaksanaan SE 11/2020 ini tapi begitu pelaksanaan mungkin agak berbeda. Selain itu di sektor transportasi darat juga mengalami persaingan (ekonomi), selain antar operator sendiri juga oleh moda transportasi misalnya jenis-jenis mobil yang sering dipakai sebagai travel gelap,” demikian disampaikan Dirjen Budi.

“Dengan penerapan pedoman dan petunjuk teknis yang berbeda sesuai zona maupun fasenya, kita jadi tahu di mana

posisi tiap daerah sehingga kita memberikan satu kebijakan yang berbeda. Jadi misalnya kalau zona merah itu tidak boleh sama sekali beroperasi untuk angkutan umumnya. Namun demikian kita sudah mencoba merespon dengan mengakomodir masukan dari para operator, kami sudah pertimbangkan apakah sesuai dengan perhitungan ekonomi, apakah sudah dapat Break Even Point (BEP) atau belum,” lanjut Dirjen Budi.

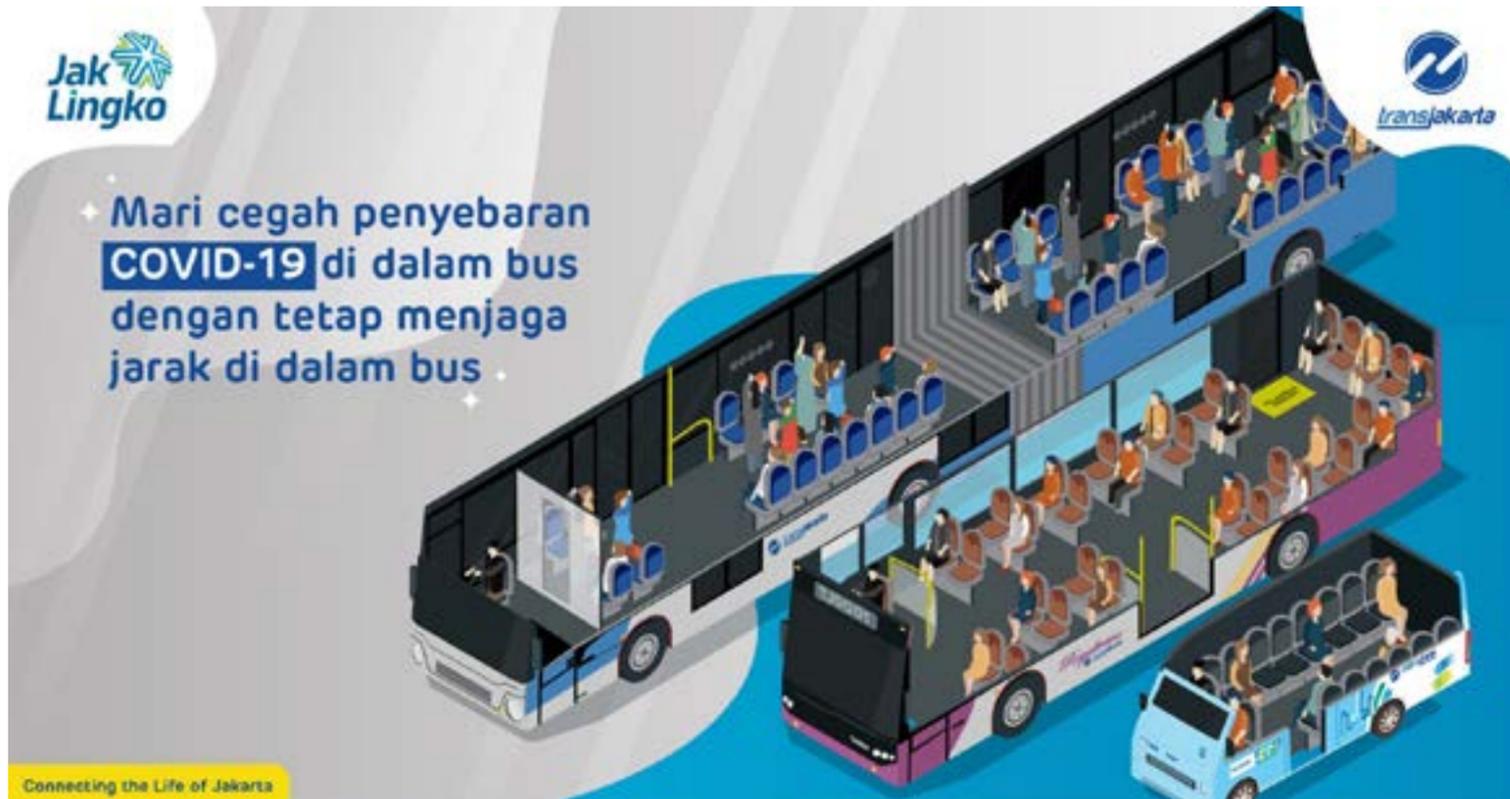
Selama masa adaptasi kebiasaan baru ini, Kemenhub juga akan mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. “Pada prinsipnya seperti arahan Bapak Menteri Perhubungan yang menekankan kepada kami bahwa protokol kesehatan penanganan Covid-19 adalah yang utama jadi kita hanya mengikuti kebijakan dari Surat Edaran Gugus Tugas dan menerapkan bagaimana refleksinya di angkutan umum,

prasarana, sarana, hingga ketentuan pada penumpang. Memang kami membuat kebijakan makro yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia namun kebijakan di daerah juga harus kita akomodir," lanjut Dirjen Budi.

Salah satu wacana kenaikan tarif angkutan umum pun sempat disinggung oleh Dirjen Budi dalam kererangannya kepada media hari ini. Menurutnya, beberapa angkutan umum, misalnya Damri yang melayani lintasan dari dan ke bandara Soekarno-Hatta mengalami kenaikan tarif dari semula Rp50.000 menjadi Rp100.000, meski demikian ia menegaskan bahwa penumpang saat ini masih dalam taraf memaklumi kenaikan tarif tersebut. Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa penumpang memahami bahwa kenaikan ini untuk menutup biaya operasional yang harus dikeluarkan dengan jumlah penumpang lebih sedikit.

"Meski demikian, nanti jika kapasitas penumpang sudah diizinkan sebesar 70% maka harapan saya (tarifnya) akan kembali normal. Load factor ini nanti setelah sudah 70% maka akan naik, tapi selain pembatasan kuota ini, apakah permintaan masyarakat sudah kembali? Kalau demand belum normal kembali, masih jauh dari yang diharapkan maka sepanjang itu operator mungkin saja masih menaikkan tarif karena operasional kendaraan masih sama dengan sebelum Covid-19," urai Dirjen Budi.

Dirjen Budi menerangkan bahwa dalam kesempatan sebelumnya, pihaknya telah berdiskusi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau (I POMI) bahwa ada wacana dari kedua asosiasi untuk menaikkan tarif sebesar 25%-50% untuk bus premium. (\*)



# LAYANAN TRANSPORTASI di Era Kenormalan Baru

Oleh: **Djoko Setijowarno** (Pengamat Transportasi)



**The new normal, diistilahkan padanannya dalam Bahasa Indonesia dengan kenormalan baru. Ada lagi alternatif lainnya, seperti kewajaran baru atau kelaziman baru, bahkan kebiasaan baru. Bisa karena biasa, biasa yang baru.**

Era normal baru sektor transportasi di negara-negara berkembang akan berbeda dengan di negara maju. Pandemi Covid-19 akan mendorong peningkatan kemiskinan dan pengangguran di negara berkembang, sehingga penggunaan transportasi publik menjadi pilihan utama (Bambang Susantono, 2020)

Negara Kolombia setara dengan Indonesia yang masih sebagai negara berkembang. Walikota Bogota (Kolombia) Claudia Lopez,

punya kebijakan selama masa karantina (pandemi Covid-19) menutup jalan sepanjang 117 km setiap hari agar pejalan kaki dan pesepeda dapat lebih leluasa

bergerak. Kemudian menambah jaringan jalur sepeda sepanjang 60 km. Apakah hal yang sama akan dilakukan juga oleh para pemimpin daerah di Indonesia, di era kenormalan baru?

Sebelumnya, sejak tahun 2000 beroperasi, Kota Bogota sukses dengan program transportasi umum busway yang sekarang ditiru banyak negara. Transmilenio sendiri merupakan jenis bus rapid transit yang berada di Bogota, Kolombia. Moda transportasi ini pertama dibangun tahun 1998. Transmilenio merupakan salah satu solusi angkutan massal perkotaan yang sangat efektif. Secara bersamaan, dibangun pula jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman dan selamat.

Di era kenormalan baru, banyak kota di mancanegara mengurangi kapasitas transportasi umum dan mengalihkan ke perjalanan menggunakan sepeda. Untuk perjalanan jarak pendek, moda sepeda dan berjalan kaki benar-



**Samping :** Pengecekan suhu tubuh pelanggan oleh petugas sebelum memasuki gate halte Pulo Gadung, 8/4/2020. Sumber: akun twitter @PT\_Transjakarta

**Bawah:** Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza mengendarai sepeda di Kawasan Bundaran HI, Selasa (16/6/2020). Anies bersepeda dalam rangka mengajak warga menggunakan masker atau face shield saat beraktivitas di luar ruangan. (merdeka.com/Imam Buhori)



benar dikembangkan sedemikian rupa (aman, nyaman dan selamat), supaya tidak beralih ke penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan.

**Era kenormalan baru bersepeda** Banyak negara berpaling pada moda transportasi sepeda untuk mobilitas jarak pendek. Bersepeda menjadi pilihan, karena selain menghindari kerumunan dalam ruang tertutup, dan menghindari antri, bersepeda membuat kesehatan tubuh terjaga. Jalan-jalan umum perlu dibuat jalur bersepeda, supaya masyarakat bisa bersepeda secara aman. Peraturan baru terkait keamanan bersepeda perlu dibuat.

Manfaat lain bersepeda dapat mengurangi polusi udara. Juga akan mempengaruhi

pertumbuhan bisnis atau usaha terkait dengan bersepeda, seperti jasa penitipan parkir sepeda, jual beli sepeda dan spare partnya, jual beli pakaian dan peralatan keamanan untuk bersepeda, usaha bengkel atau reparasi sepeda.

Di Indonesia, baru Kota Jakarta yang berkomitmen membangun jalur sepeda sepanjang 63 kilometer dari target 545 kilometer. Tahun 2020, target 200 kilometer, nampaknya tidak dapat terwujud, anggaran difokuskan penanganan dampak virus corona.

Lantas, bagaimana dengan kota lainnya yang sudah punya jalur sepeda, namun asal ada, tidak ada kejelasannya target pencapaian. Hanya sekedar memenuhi janji

kampanye, setelah terpilih bikin jalur sepeda, tetapi tidak diikuti membiasakanarganya bersepeda untuk aktivitas kesehariannya.

Mengembangkan jalur sepeda di Indonesia akan menghadapi kendala. Selain alasan cuaca, juga kontur jalan naik turun di sebagian wilayah. Yang jelas, sekarang ini umumnya masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan sepeda motor. Perjalanan jarak pendek, menengah atau panjang bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, sepeda motor yang digunakan. Sepeda motor di Indonesia diciptakan tidak untuk perjalanan jarak sedang atau menengah, namun untuk perjalanan jarak jauh. Buktinya, masa mudik lebaran yang dulunya banyak menggunakan bus, sekarang beralih menggunakan sepeda motor.

Budaya berjalan kaki apalagi bersepeda sudah menghilang. Ditambah lagi tidak tersedia fasilitas pendukung yang memadai (aman, nyaman dan selamat). Padahal, sebelum ada kemudahan mendapatkan sepeda motor, masyarakat Indonesia sudah terbiasa bersepeda atau berjalan kaki.

**Era kenormalan baru di transportasi umum (bus, angkot, kereta)**

Yang dapat dilakukan, seperti selalu memakai masker, datang lebih awal ke halte bus atau stasiun, untuk menghindari kepadatan di kendaraan telat tiba di tujuan. Jika kendaraan umum sudah penuh, gunakan kendaraan umum selanjutnya. *Safety distance* (jarak aman) saat di dalam kendaraan umum untuk saat duduk, saat berdiri, dijaga 1,5 meter - 2 meter. Tempat duduk/lantai bisa ditandai untuk memudahkan pelaksanaannya.

Dilakukan *check temperature* (suhu) penumpang dan staf sebelum masuk kendaraan, yang suhu-



Shanghai Sunwin Bus Corporation (SUNWIN) meluncurkan Healthcare Bus, yang secara khusus dirancang untuk mengurangi risiko infeksi Virus Corona dan membuat transportasi umum lebih aman. Sumber: prnewswire.com

nya tinggi/sakit istirahat berada di rumah saja (isolasi diri, periksa ke dokter). Menjaga kebersihan dan disinfektan kendaraan secara rutin. Di bagian ruang pengemudi, dibuatkan pembatas plastik atau mika supaya pengemudi terlindungi, rajin cuci tangan, memakai disinfektan, jangan menyentuh wajah dengan tangan. Jika batuk, ditutupi dengan lengan anda, jangan dengan tangan anda.

**Penyesuaian transportasi umum terhadap The New Normal - Shanghai**

Mengutip dari [www.prnewswire.com](https://www.prnewswire.com), saat ini Kota Shanghai (Tiongkok) telah mengalami penurunan kasus virus corona. Transportasi umum telah dibuka kembali seiring dengan mulainya masyarakat untuk kembali bekerja. Pengguna angkutan umum kembali mengalami peningkatan.

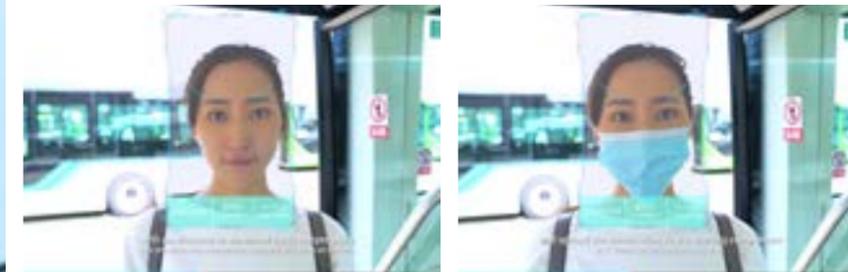
Namun perusahaan transportasi Kota Shanghai tidak mau mengambil risiko. Shanghai Sunwin Bus Corporation (SUNWIN), penyedia angkutan umum terkemuka Kota Shanghai telah mulai

meluncurkan *Healthcare Bus*, yang secara khusus dirancang untuk mengurangi risiko infeksi virus corona dan membuat transportasi umum lebih aman.

*Healthcare Bus* berfokus pada penggunaan solusi teknis yang inovatif untuk memastikan keselamatan penumpang dengan cara yang tidak invasif. Melalui teknologi pengenalan wajah, pembacaan suhu, pencahayaan ultra violet (UV), dan sistem deteksi gas otomatis.

Saat penumpang masuk bus, system *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang dipasang di sebelah mesin tiket. Alat itu akan melakukan pengecekan wajah penumpang dan mengecek suhu thermal badan menggunakan infrared. Sistem ini juga secara otomatis mengidentifikasi apakah penumpang menggunakan masker.

Sistem ini digunakan untuk memberitahu pengemudi kondisi setiap penumpang, apakah ada yang sedang demam. Proses pengecekan ini otomatis dan



Saat penumpang masuk bus, system *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang dipasang di sebelah mesin tiket. Alat itu akan melakukan pengecekan wajah penumpang dan mengecek suhu thermal badan menggunakan infrared. Sistem ini juga secara otomatis mengidentifikasi apakah penumpang menggunakan masker. Sumber: prnewswire.com

tanpa melakukan kontak dengan penumpang, sehingga tidak menimbulkan antrian panjang saat penumpang padat (*rush hours*) dan tidak memperlambat jadwal atau waktu operasional bus.

Peningkatan keamanan tambahan yang ada di dalam bus adalah, adanya penggunaan pencahayaan UV di dalam saluran udara untuk mensterilkan dan membunuh virus secara efektif. Pencahayaan UV yang mencapai 20mJ telah terbukti menghancurkan hingga 99 persen bahan genetik (DNA atau RNA) mikroorganisme, bakteri, dan virus yang lebih kecil dari 253,7nm, membuat mereka tidak dapat mereplikasi dan karenanya menghilangkan sumber infeksi.

Dikombinasikan dengan sistem penyaringan udara yang ditingkatkan, ini memungkinkan seluruh bus disterilkan sepenuhnya dalam 20 menit. Melalui penggunaan pencahayaan UV secara teratur dan penyaringan udara yang ditingkatkan, akan memastikan risiko infeksi pada penumpang lain berkurang secara signifikan.

Peningkatan keamanan utama terakhir yang disediakan adalah dalam bentuk sistem deteksi otomatis yang mudah terbakar dan meledak. Ditempatkan di bawah pintu depan dan belakang, sistem deteksi pintar ini secara otomatis memberi tahu pengemudi dan otoritas kepolisian setempat tentang segala kemungkinan benda mudah terbakar di atas bus.

Jika model bus ini dapat dibuat dan diproduksi di Indonesia akan sangat membantu pengembangan transportasi umum higienis di Indonesia saat ini. Mulai tahun 2020, ada lima kawasan perkotaan di Indonesia dibangun transportasi umum perkotaan dengan skema pembelian layanan (*buy the service*), yakni Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta dan Denpasar.

Di era kenormalan atau kewajaran baru transportasi, pemihakan pada transportasi umum dapat lebih ditingkatkan, minimal dipertahankan yang sudah ada. Kelengkapan penunjang jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki harus dibangun untuk perjalanan jarak pendek sebagai upaya memenuhi pengurangan

kapasitas transportasi umum. Kebijakan industri dan bisnis sepeda motor perlu ditata kembali, sehingga sepeda motor bukan menjadi hambatan untuk mengembangkan transportasi tidak bermotor (*non motorized*).

Presiden Joko Widodo dikenal sering memberikan hadiah sepeda pada setiap pertemuan dengan masyarakat. Namun, perlu diikuti anjuran atau kewajiban ke setiap pemda agar membangun jalur sepeda di setiap kota di Indonesia, supaya sepeda yang diberikan dapat benar-benar bermanfaat. Bukan sekedar pajangan di rumah, karena hadiah dari presiden.

Berjalan kaki, bersepeda dan menggunakan transportasi umum bukan untuk warga kelas bawah. Namun untuk semua warga Indonesia menuju transportasi yang sehat dan selamat. (\*)

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat & Anastasia Yulianti, peneliti Laboratorium Transportasi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Anggota MTI Jawa Tengah

# TRANSPORTASI DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

**Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi terkait new normal (normal baru), pemerintah terus mengkaji tahapan, pola, dan waktu yang tepat untuk menerapkan normal baru sesuai dengan data dan fakta di lapangan.**

Dalam tulisannya yang dimuat di harian Kompas, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sektor transportasi mengalami pergeseran paradigma dari lama ke baru. Selama ini salah satu fungsi utama transportasi di masyarakat adalah mempertemukan warga secara tatap muka atau jadi fasilitator interaksi sosial. Kini fungsi itu terhenti sebagai akibat restriksi-restriksi di seluruh dunia. Secara bersamaan sektor transportasi dituntut terus berfungsi dalam

mendukung pergerakan orang dan barang. Rantai pasok harus terus bergerak untuk menekan dampak ekonomi.

Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan sejumlah universitas, yakni UGM, UI, ITB, dan ITS, telah melaksanakan sejumlah kajian dan menghasilkan policy paper dari berbagai sudut pandang sebagai bahan-bahan penyusunan kebijakan.

Pandemi Covid-19 merupakan satu ujian amat berat yang harus

dihadapi bangsa kita. Upaya mitigasi bencana Covid-19 yang dilakukan sering harus berbenturan arah dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan (aktivitas sosial ekonomi) dan penghidupan (mata pencarian) masyarakat. Pembatasan sosial dan pergerakan penumpang melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi, juga membuat sektor transportasi secara umum mati suri.

Di semua subsektor, baik transportasi udara, perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, pelayaran kapal laut, bus AKAP/ AKDP, bahkan angkutan umum dan ojol, mengalami turbulensi (guncangan) berat. Meski demikian, di tengah pandemi, sektor transportasi masih harus tetap beroperasi secara minimal untuk misi-misi kemanusiaan dan mempertahankan rantai pasok logistik.

Secara prinsip, selama vaksin belum tersedia, kendati penyebaran Covid-19 relatif terkendali, keadaan tak akan kembali biasa seperti prapandemi. Sejumlah pakar bahkan menyebut pandemi Covid-19 akan menjadi endemi sebagaimana HIV dan ebola. Satu-satunya senjata paling ampuh untuk melawan Covid-19 adalah membatasi kontak antarmanusia sebisa mungkin dan berperilaku higienis sebaik mungkin.



Penumpang di dalam bus Trans-Jakarta di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Pemprov DKI Jakarta membatasi jumlah penumpang dan jam operasional angkutan umum dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada 10 April 2020 untuk pencegahan penyebaran COVID-19. ANTARAFOTO/ Aprilio Akbar

fisik antarmanusia sekaligus tantangan dalam pengelolaan prasarana/ sarana transportasi. Semua subsektor melakukan digitalisasi, penyeberangan meluncurkan sistem tiket online Ferizy. Angkutan perkotaan dengan skema *buy the service* meluncurkan aplikasi Teman Bus. Digitalisasi dapat meminimalkan kontak antarmanusia sekaligus meningkatkan kinerja operasional. Implikasinya, biaya modal dan operasional juga meningkat.

**Antar-pemangku kepentingan** Pengendalian Covid-19 dan implementasi normal baru di sektor transportasi menghadirkan tantangan-tantangan berat. Namun, tanpa fase ini, kita tak bisa melangkah maju, hanya berjalan di tempat atau bahkan mundur. Tanpa sektor transportasi, mesin pertumbuhan ekonomi tak akan berputar. Betapapun beratnya, tantangan itu harus kita hadapi bersama sesuai prinsip "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" dalam tradisi kegotong-royongan kita. Hal ini membutuhkan kolaborasi dan saling dukung dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat madani.

Perguruan tinggi sangat diharapkan meningkatkan perannya, terutama melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, dalam rangka mitigasi dampak Covid-19 dan penerapan normal baru. Kita perlu membangun sistem transportasi berbudaya higienis (transportasi humanitarian) dan meminimalkan kontak fisik, lebih terdigitalisasi, dan lebih terdesain secara adaptif meski tarif transportasi publik cenderung lebih mahal atau perlu subsidi lebih besar dari pemerintah. Namun, kita optimistis, normal baru, termasuk di transportasi akan memberikan hikmah dalam restrukturisasi perekonomian nasional.(\*)

Implikasinya, kitalah yang harus beradaptasi dengan keadaan. Perilaku bertransportasi akan berubah dari old normal menjadi new normal. Para pengguna dan penyelenggara/operator transportasi perlu beradaptasi dengan kenormalan/kebiasaan baru dalam bentuk prosedur atau protokol baru berbasis kesehatan dan kebersihan (*higiene*) serta spacing atau physical distancing. Secara umum, normal baru memiliki setidaknya dua keuntungan. Pertama, protokol kesehatan akan menjaga Indonesia dari ancaman pandemi (berkelanjutan). Kedua, mendukung keberlangsungan negara dari berbagai sisi dan mencegah berbagai masalah baru, seperti krisis fiskal, ketahanan pangan, dan gangguan sistem pendidikan.

**Tantangan Normal Baru** Menyongsong penerapan normal baru di sektor transportasi, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Pertama, penerapan protokol kesehatan dan physical distancing menjadi tantangan baik bagi regulator/fasilitator, operator prasarana/sarana, maupun pengguna transportasi, terutama transportasi publik. Regulator perlu menyiapkan pedoman sekomprensif mungkin dalam penerapan protokol kesehatan untuk diturunkan menjadi SOP oleh para operator. Penumpang yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta harus bekal surat izin keluar masuk (SIKM) yang dapat

diperoleh secara daring. Pada subsektor transportasi laut maupun TSDP, operator pelabuhan ataupun kapal penyeberangan/ pelayaran harus menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing, termasuk penambahan peralatan perlindungan kesehatan pekerja pelabuhan dan awal kapal, serta dekontaminasi bangunan pelabuhan dan kapal. Demikian juga pada transportasi darat (bus kota, AKAP, AKDP), stasiun, terminal/pul/shelter/halte, perlu menyiapkan penerapan protokol kesehatan, disinfeksi, dan physical distancing. Implikasinya, biaya modal/operasional meningkat. Kedua, penerapan *physical distancing* dengan pengisian tempat duduk hanya 50 persen kapasitas jadi tantangan berat operator sarana transportasi. Dari sisi permintaan, kebijakan restriksi membatasi jumlah penumpang, sedangkan dari sisi *supply*, penerapan *physical distancing* membatasi jumlah kursi yang tersedia bagi penumpang. Tanpa penyesuaian tarif, ini berpengaruh besar pada ketahanan/keberlanjutan finansial operator transportasi dan pengembalian biaya investasi. Di sisi lain, penyesuaian tarif berdampak terhadap daya jangkau masyarakat/ penumpang. Tantangan lebih berat lagi akan dihadapi oleh operator transportasi/ penyedia jasa transportasi berskala kecil dan mikro (*feeder, speedboat, angkutan kota dan ojol*).

Ketiga, digitalisasi menjadi strategi untuk meminimalkan kontak



## ADAPTASI KEBIASAAN BARU TRANSPORTASI

Para pengguna dan penyelenggara/operator transportasi perlu beradaptasi dengan kenormalan/kebiasaan baru dalam bentuk prosedur atau protokol baru berbasis kesehatan dan kebersihan (*hygiene*) serta spacing atau *physical distancing*.

Budi Karya Sumadi  
Menteri Perhubungan

# MENGAWAL KEBIJAKAN TIDAK MUDIK TIDAK PIKNIK

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyusun strategi antisipasi penanganan penyebaran COVID-19 di bidang transportasi darat, serta mengubah strategi penyelenggaraan angkutan selama periode Lebaran 2020 dengan *guidance* penerapan PSBB dan protokol kesehatan.

Tahun 2020 menjadi sejarah baru yang mengubah tradisi mudik bagi Masyarakat Indonesia dikala menyambut hari Raya Idul Fitri. Pada momen ini, biasanya jutaan masyarakat Indonesia yang merantau berbondong-bondong pulang ke kampung halaman sebagai momentum untuk membagikan haru dan kebahagiaan dengan orang tua, keluarga, kerabat serta tentangga yang sudah lama tidak berjumpa.

Momen istimewa tersebut tidak luput dari perhatian Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat sebagai ujung tombak Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan di bidang transportasi darat. Perhatian khusus tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berupa pengaturan operasional transportasi darat, manajemen rekayasa lalu lintas, antisipasi keamanan dan keselamatan, pemenuhan kuota pelayanan arus mudik, dan bahkan melalui program mudik gratis untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul baik lokal maupun nasional dari arus mudik yang terjadi.

# KACA MOBIL HARAP DIBUKA

Sejumlah petugas gabungan dari unsur Perhubungan, TNI, Polri, Pol. PP, berjaga di Pos Penyekatan Gerbang Tol Cikupa, 29/5/2020. Foto: HMS DJPD

Namun, sejak diumumkannya kasus COVID-19 pertama telah masuk di Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, dan disusul dengan fakta penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia,

Pemerintah telah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan disusul dengan kebijakan-kebijakan lain seperti pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan bahkan himbauan serta upaya pembatasan pergerakan untuk tidak mudik.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat secara cepat menyusun strategi antisipasi penanganan penyebaran COVID-19 di bidang transportasi darat, serta tidak lepas untuk merubah strategi kebijakan dalam penyelenggaraan angkutan selama periode Lebaran 2020 dengan *guidance* penerapan PSBB dan Protokol Kesehatan. Hal ini menjadi tantangan baru bagi Ditjen Perhubungan Darat dalam melaksanakan operasional Angkutan Lebaran 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke seluruh wilayah NKRI.

**Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19**  
Berdasarkan Keputusan Presiden

**“Dengan PSBB, kita berupaya menghambat penyebaran Covid-19, tetapi roda perekonomian tetap berjalan. Masyarakat masih bisa beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin mematuhi protokol kesehatan.”**

\*\*\*\*\*  
Joko Widodo  
Presiden RI

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19), Presiden Republik Indonesia telah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia. Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas wilayah dan

lintas negara yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, antara lain sebagai berikut:

PERPPU NO. 1 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

PP NO. 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

KEPPRES 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keppres 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona*

*Virus Disease* 2019 (COVID-19) PERMENKES NO. 9 Tahun 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

**Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Transportasi Selama Pandemi Covid-19**

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) juga berdampak pada sektor transportasi, dalam rangka menekan penyebaran

*Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di sektor transportasi dan melindungi pengguna jasa transportasi, maka Kementerian Perhubungan telah menetapkan beberapa Peraturan Menteri Perhubungan antara lain:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease*, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah yang dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang;
2. Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang dilakukan pada saat: a. persiapan perjalanan; b. selama perjalanan; dan c. sampai tujuan atau kedatangan.
3. Pengendalian transportasi yang mengangkut logistik/barang dilakukan oleh: a. operator sarana transportasi; b. pengelola operasional angkutan; dan c. pengirim dan pemilih.
4. Pengendalian transportasi dimaksud antara lain berupa, penerapan protokol kesehatan, penerapan jaga jarak (*physical distancing*), penjualan tiket secara online.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang mengatur pedoman larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah.

**Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menetapkan masa darurat nasional untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19. Hal ini



Suasana pemeriksaan kendaraan yang hendak masuk ke Jakarta, perbatasan Karawang-Bekasi, 27/5/2020. Pemprov DKI menyarakatkan SIKM bagi warga yang hendak masuk/keluar wilayah Jakarta. Foto: HMS DJPD

## INFO KHUSUS

diimplementasikan melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah yang dinyatakan memenuhi syarat, seperti Jakarta (Jabodetabek), Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masa PSBB dilakukan selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai intruksi dari masing-masing kepala daerah.

Agar masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dan peraturan PSBB, Kemenhub merilis kebijakan Permenhub No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini pun semakin diperkuat dengan peraturan yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Selama masa PSBB, hanya beberapa transportasi yang masih diperbolehkan untuk beroperasi. Transportasi tersebut diantaranya kendaraan pengangkut logistik atau barang kebutuhan pokok, kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan petugas penanganan pencegahan Covid-19, dan kendaraan tidak membawa penumpang, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

Sedangkan untuk calon penumpang, kriteria yang diperbolehkan bepergian hanya orang-orang yang akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19, yaitu :

- Orang-orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan seperti: pelayanan percepatan penanganan Covid-19; pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum; pelayanan kesehatan; pelayanan kebutuhan dasar; pelayanan pen-



- 1 Direktur Jenderal Perhubungan Darat bersama sejumlah pejabat terkait terjun ke lapangan meninjau kegiatan pemeriksaan kendaraan angkutan penumpang di Check Point Km 47 Tol Jakarta-Cikampek, 28/5/2020. Pemerintah melarang mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Foto: HMS DJPD
- 2 Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Risal Wasal sedang memeriksa kendaraan di Check Point Rindu Alam, Cisarua, Bogor, 21/5/2020. Foto: HMS DJPD
- 3 Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani sedang memeriksa kendaraan di Check Point Rindu Alam, Cisarua, Bogor, 21/5/2020. Foto: HMS DJPD

- dukungan layanan dasar; dan pelayanan fungsi ekonomi penting.
- Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.
- Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, peraturan PSBB sering disalahartikan oleh masyarakat

bahwa pemerintah mengizinkan kembali untuk beraktifitas di luar rumah. Untuk meningkatkan pemahaman kontekstual dari Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tersebut, khususnya pada bidang transportasi darat, Dirjen Hubdat mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan Nomor SE.9/AJ.201/DRJD/2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Darat untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. SE berlaku sejak 8 Mei hingga 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Melalui SE ini, Dirjen Hubdat Budi Setiyadi memastikan akan melakukan pengawasan serta pelaksanaan sesuai dengan SE Gugus Tugas Nasional. Dirjen Hubdat pun berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional untuk memastikan terminal penumpang, pelabuhan penyeberangan dapat beroperasi selama 24 jam dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

**Pengendalian Arus Mudik 2020**  
Berkenaan dengan tradisi mudik, Kemenhub mengeluarkan Permenhub No 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik

Idul Fitri 1441 H. Permenhub ini selaras dengan SE Nomor 4 Tahun 2020 yang diterbitkan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Mendukung penerapan kebijakan "Larangan Mudik" tersebut, Dirjen Hubdat memastikan kepada seluruh seluruh pelaksana di lapangan seperti Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Kepala Dinas Perhubungan, serta operator angkutan umum wajib mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Permenhub No 25 Tahun 2020 maupun SE Nomor 4 Tahun 2020.

"Tidak semua masyarakat boleh menggunakan kendaraan ini untuk bepergian. Seperti yang sudah saya bahas mudik tetap dilarang namun sesuai SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kami memberikan akses kepada masyarakat yang memiliki kepentingan. Jenis kepentingannya seperti tugas negara maupun tugas dari kantor dengan persyaratan harus mematuhi administrasi yang ada seperti surat keterangan sehat, surat keterangan dari pimpinan apabila dari kantor, serta surat jalan yang resmi sesuai syarat dari Gugus Tugas," tutur Budi.



Dengan adanya pelarangan mudik serta melihat perkembangan kondisi di lapangan, Dirjen Hubdat memastikan program mudik gratis yang telah direncanakan sejak Februari 2020 resmi dibatalkan. Dirjen Hubdat menuturkan, mudik gratis menggunakan bus dan kapal penyeberangan resmi tidak akan berlangsung.

Sosialisasi larangan mudik pun dilakukan Dirjen Hubdat secara kooperatif. Bersama Kepolisian, Dirjen Hubdat menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik, dan mengganti silaturahmi melalui media elektronik atau video call.

“Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, bersama-sama dengan kementerian terkait dan Kepolisian, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik di lebaran 2020. Kemudian kita akan melaksanakan silaturahmi hanya di tempat masing-masing menggunakan video call dengan keluarga,” ujar Budi.

Pengawasan pada musim mudik 2020 pun dilakukan jelang Idul Fitri, saat Idul Fitri, dan pasca Idul Fitri. Fase jelang Idul Fitri dimulai pada 25 April 2020 hingga 23 Mei 2020, fase saat Idul Fitri pada 24 dan 25 Mei 2020, dan fase pasca

Idul Fitri pada 26 Mei hingga selesainya masa berlaku SE Gugus Tugas.

Pengawasan pengendalian transportasi yang telah dilakukan yaitu:

1. Melakukan penyekatan disejumlah titik di jalan
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan syarat berlaku
3. Penerapan tersebut dilakukan di seluruh transportasi seperti Terminal, Stasiun, Bandara, dan Pelabuhan
4. Bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk berjaga dimasing-masing lokasi

**Kesimpulan**

Kondisi periode Mudik & Balik tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan periode Mudik & Balik tahun 2019. Jika pada tahun 2019 pemerintah berupaya untuk mempermudah pergerakan angkutan penumpang dan membatasi pergerakan angkutan barang tetapi pada tahun 2020 pemerintah justru mencegah/mengendalikan pergerakan angkutan penumpang dan mempermudah pergerakan angkutan barang.

Kendaraan yang keluar dan masuk Jabodetabek via jalan tol dan jalan arteri periode Mudik & Balik Tahun 2020 turun di bandingkan tahun 2019. Total kendaraan keluar

Jabodetabek via jalan tol H-7 s.d. H2 adalah 552.759 turun 65,97 % dibanding 2019.

Total kendaraan keluar Jabodetabek via jalan tol H-7 s.d. H2 adalah 552.759 turun 65,97 % dibanding 2019. Total kendaraan keluar Jabodetabek via jalan arteri H-7 s.d. H2 (periode mudik) adalah 428.380 turun 66,32 % dibanding 2019. Total kendaraan masuk Jabodetabek via jalan arteri H+1 s.d. H+7 (periode balik) adalah 206.06 turun 74,64 % dibanding 2019.

Jumlah kecelakaan lalu lintas pada periode Mudik & Balik tahun 2020 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 27,7%. Hal ini disebabkan kondisi lalu lintas yang sepi mendorong pengendara memacu kendaraan dengan cepat sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan.

Produksi kendaraan dan penumpang angkutan bus selama periode Mudik & Balik tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah kendaraan yang datang menurun sebesar 92,21% dan kendaraan yang berangkat menurun sebesar 92,28%. Adapun jumlah penumpang yang datang menurun sebesar 98,13 % dan penumpang yang berangkat menurun sebesar 97,85%. (\*)

## Menyelundupkan Pemudik, Puluhan Travel Gelap Terjaring Razia



Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Ahmad Yani, bersama Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Sambodo Pramono Yogo, menggelar jumpa pers usai mengamankan puluhan travel gelap yang terjaring razia karena terbukti menyelundupkan pemudik. Pemerintah melarang kegiatan mudik untuk menekan penyebaran Covid-19. (21/5/2020)

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjaring kendaraan-kendaraan tanpa izin yang dijadikan travel gelap untuk membawa penumpang yang ingin mudik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada Kamis (21/5), Polisi mengamankan sejumlah 95 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 2 unit bus, 40 unit minibus, dan 53 unit mobil pribadi.

“Kegiatan ini merupakan Operasi Khusus Penertiban Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki izin trayek dan dilakukan oleh rekan-rekan Ditlantas Polda Metro Jaya. Jadi dalam kegiatan ini kami menemukan masih banyak orang yang berusaha untuk mudik ke daerah. Dari hasil operasi ini berhasil menggagalkan 719 orang yang ingin mudik,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Polda Metro Jaya, sejak

“Kegiatan ini kami gencarkan untuk antisipasi lonjakan selama arus mudik terutama hari-hari sebelum Lebaran. Apalagi selama belum ada pencabutan larangan mudik oleh pemerintah, maka operasi ini akan kami lakukan terus untuk mencegah masyarakat bepergian agar mengurangi penyebaran Covid-19,” tambah Dirjen Budi.

Berdasarkan keterangan Ditlantas Polda Metro Jaya modus operandinya travel gelap ini adalah dengan cara menawarkan dari mulut ke mulut dan media sosial. Harga tiket yang ditawarkan juga cukup mahal berkisar Rp500.000 untuk ke Brebes atau Cilacap, padahal harga normal hanya Rp150.000.

Untuk para pengemudi akan dikenakan saksi tilang dengan dijerat Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda maksimal Rp500.000 atau kurungan penjara maksimal dua bulan.

“Setelah pengemudi maupun penumpang ini dicatat datanya dan ditilang, maka akan dipersilahkan kembali. Sementara penumpang akan kami angkut untuk diantar ke terminal Pulogebang,” urai Dirjen Budi. (\*)



**D**emi menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah melarang kegiatan mudik lebaran. Dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Penyeberangan Merak, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan bahwa sesuai dengan Permenhub 25 Tahun 2020, angkutan penyeberangan hanya melayani kendaraan logistik serta penumpang khusus yang telah lolos verifikasi tim gugus tugas Covid-19 di lapangan sesuai SE Nomor 4 Tahun 2020. Di masa pandemi ini, pemerintah menjamin kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok daerah melalui berbagai moda transportasi.

Berdasarkan data dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), selama periode Angkutan Lebaran mulai Minggu (17/5) atau H-7 hingga Senin (25/5) atau hari kedua Lebaran (HH), sebanyak 45.131 unit truk logistik telah menggunakan jasa penyeberangan di 9 lintasan penyeberangan. Jumlah ini naik 50,56 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu sebanyak 29.975 unit. Sembilan lintasan penyeberangan tersebut yakni Ajibata-Ambarita, Tj. Kelian - Tj Api-api, Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Kariangau-Panajam, Bajoe-Kolaka, Bira-Pamatata.

Mulai 1 Mei, reservasi atau pembelian tiket penyeberangan wajib dilakukan secara online melalui [www.ferizy.com](http://www.ferizy.com) (no go show di pelabuhan), khususnya 4 pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk. Layanan Ferizy ini dipastikan akan sangat memudahkan pengguna jasa karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja menggunakan smartphone yang dimiliki.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),



Kendaraan angkutan barang sedang keluar dari kapal penyeberangan. Pada masa lebaran, angkutan penyeberangan hanya melayani kendaraan logistik. Foto: PT. ASDP

# KELANCARAN PENYEBERANGAN LOGISTIK DI TENGAH PANDEMI

**Penumpang pejalan kaki, sepeda motor, kendaraan pribadi, sementara tidak kita seberangkan dulu. Demikian disampaikan Budi Setiyadi dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Penyeberangan Merak.**

Ira Puspawati, mengatakan, "Penjualan tiket untuk truk logistik pun kini sudah 100 persen via online. Kami harapkan, pengguna jasa sektor logistik kini semakin mudah, cepat, dan nyaman saat membeli tiket ferry."

Kendati hanya melayani penyeberangan sektor logistik saat ini, ASDP memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat baik di pelabuhan maupun di kapal, mulai dari desinfektan lingkungan, physical distancing saat kendaraan akan masuk, berada di kapal hingga keluar dari kapal, serta mewajibkan penggunaan masker bagi pengendara maupun petugaa saat berada di pelabuhan maupun di kapal.

Wakil Ketua Umum Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia), Kyatmaja Lookman, mengungkapkan, "Transportasi logistik selama pandemi Covid terbilang cukup lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Walaupun ada pembatasan angkutan penumpang, namun pemerintah justru mendukung angkutan barang." Menurutnya saat lebaran yang biasanya ada pembatasan angkutan barang, kali ini tidak ada pembatasan kendaraan. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua barang tersedia bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke dengan harga yang terjangkau. Dia melanjutkan, "Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Perhubungan karena telah mewujudkan hal

ini, sehingga masyarakat tidak terpapar virus, dan ekonomi tidak terkapar karenanya."

Sesuai prediksi, menjelang Hari Raya Idul Fitri tren angkutan logistik terus mengalami kenaikan, khususnya dari Sumatera ke Jawa menyusul permintaan kebutuhan bahan pokok yang meningkat. Melalui moda penyeberangan, pemerintah fokus menjaga agar penyeberangan logistik tetap berjalan lancar sehingga pasokan bahan pokok dapat terdistribusi ke seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk tetap menjaga kelancaran distribusi logistik kebutuhan masyarakat di seluruh daerah sesuai arahan Presiden RI. (\*)



## RAPID TEST GRATIS BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

Kementerian Perhubungan menggelar *rapid test* atau pemeriksaan cepat COVID-19 secara *drive thru* di halaman depan kantor Kementerian Perhubungan pada Senin (20/4). Sebanyak 200 peserta yang dites berasal dari pengemudi taksi, ojek online, angkutan umum, hingga bajaj. "Sesuai arahan Pak Menteri Perhubungan, hari ini Kemenhub melakukan *drive thru rapid test*

untuk bidang transportasi. Sekitar 200 paket tes kami siapkan. Kita tahu bahwa pengemudi adalah garda terdepan yang selalu bertemu penumpang atau orang banyak, oleh karena itu perlu kita lakukan test apakah pengemudi tersebut sehat dan bebas dari Covid-19," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi yang memantau jalannya *rapid test*.

Dirjen Budi juga mengharapkan akan muncul kesadaran masyarakat maupun pihak lainnya untuk melakukan hal serupa yakni dengan menggelar *rapid test* agar dapat terpetakan siapa saja yang terpapar atau yang menjadi *carrier* penyakit Covid-19.

Selanjutnya, Dirjen Budi menyampaikan bahwa akan dilaksanakan tahap kedua *rapid test* ini. "Pesannya dari *rapid test* ini adalah supaya meningkatkan kesadaran masyarakat, operator, maupun pengemudi. Kemenhub peduli pada kondisi kesehatan pengemudi, bagi para operator bus maupun kapal juga sudah kami minta untuk membersihkan kapal dan menyemprot disinfektan secara berkala sebagai pencegahan. Kalau pesan ini sudah sampai pada masyarakat dan kegiatan ini dirasa perlu maka kita akan adakan tahap kedua," tambah Dirjen Budi.

Dirjen Budi menjelaskan jika dalam *rapid test* tersebut ada pengemudi yang reaktif, maka akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan penanganan kesehatan lebih lanjut. (\*)

1 Petugas medis sedang melakukan rapid test pada pengemudi taksi di halaman Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 20/4/2020. Foto: HMS DJPD/MAD

2 Pengemudi bajaj sedang menjalani rapid test di Kemenhub, Jakarta, 20/4/2020. Foto: HMS DJPD/MAD

3 Seorang driver ojek online sedang diambil sampel darahnya untuk rapid test di Kemenhub, Jakarta, 20/4/2020. Foto: HMS DJPD/MAD



Saat ini, dampak pandemi Covid-19 merambah ke sektor transportasi, khususnya bisnis transportasi umum. Di Indonesia, bisnis transportasi umum makin terpuruk, bahkan mendekati titik nadir. Tidak terkecuali dengan transportasi daring (online) yang digadang-gadang oleh pemerintah dapat mengatasi pengangguran, ternyata justru memberhentikan sejumlah karyawannya. Pasalnya, sepiya penumpang yang menggunakan transportasi umum. Selain juga karena kebijakan terkait pembatasan jumlah penumpang.

Kebijakan *lockdown* dan *physical distancing* telah menghancurkan bisnis angkutan umum. Jumlah penumpang angkutan umum menurun hingga 70 persen di berbagai negara dunia. Penurunan terbesar adalah angkutan umum jarak jauh.

Operator angkutan umum berjuang keras untuk dapat mempertahankan tingkat layanan. Masyarakat yang semula menggunakan angkutan umum, bergeser menggunakan angkutan pribadi, karena mereka merasa memiliki kendali atas siapa saja yang menyentuh kursi/apa pun yang ada di dalam kendaraan mereka. Dan hal itu tidak dapat terjadi dalam angkutan umum.

Masyarakat yang menggunakan angkutan umum saat ini (*pasca lockdown*) adalah masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain. Umumnya mereka adalah pekerja di rumah sakit, pertokoan, dan sebagainya. Sedangkan pekerja kerah putih memilih menggunakan kendaraan pribadi

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno berpendapat bahwa tanggung jawab pemerintah dalam transportasi terutama berkaitan dengan penyediaan prasarana/infrastruktur dan transportasi

## BUY THE SERVICE, SKEMA BARU PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

Penyelenggaraan transportasi umum pemerintah pusat dengan skema pembelian layanan (*buy the service*) dapat membantu mengurangi beban pengusaha angkutan umum di daerah.



Bus Trans Musi Palembang, kini hadir melayani masyarakat Kota Palembang secara gratis melalui aplikasi Teman Bus. Layanan Teman Bus telah beroperasi di Palembang sejak diluncurkan pada 2 Juni 2020. Foto: HMS DJPD/MAD

umum (*public transportation*). "Pemerintah adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap kinerja dari sektor transportasi tersebut," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya. Dengan demikian maka baik buruknya kinerja sektor transportasi sangat tergantung dari konsistensi dan implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah.

Menurut Djoko, guna meningkatkan kinerja angkutan umum maka salah satu kebijakan yang harus dilakukan pemerintah adalah membeli semua layanan dan kemudian merencanakan kembali angkutan umum yang aman, nyaman dan handal, yang dibarengi dengan menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Untuk membangkitkan bisnis transportasi umum di daerah, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan Program Pembelian Layanan (*Buy the Service*). Adanya program ini cukup menghibur para pengusaha transportasi umum di daerah yang kondisinya terpuruk.

Angkutan massal perkotaan merupakan *public goods*, sehingga pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Program *Buy the Service* (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan dari operator dengan mekanisme lelang berbasis standar

## INFO ANGKUTAN

pelayanan minimal atau *quality licensing*.

Kehadiran program *Buy The Service* (BTS) yang dilakukan Pemerintah dengan pembelian layanan untuk angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal (SPM) di 5 daerah merupakan langkah yang baik untuk penataan transportasi umum di daerah. Hingga saat ini, program BTS akan hadir di 5 kota yakni Palembang, Medan, Surakarta, Yogyakarta, dan Denpasar. Yang pertama beroperasi yakni di Kota Palembang telah melayani sejak 2 Juni 2020. Dan untuk kota-kota lainnya ditargetkan akan segera dioperasionalkan kemudian.

Lisensi pelaksanaan diberikan kepada operator yang memenuhi kualifikasi. Operator wajib menjalankan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diterapkan Sanksi terhadap setiap pelanggaran Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah mensubsidi 100 persen Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang diperlukan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.

Standard minimal ditetapkan oleh Pemerintah agar layanan angkutan memiliki kualitas dan pelayanan yang prima. Keamanan, misalnya ketersediaan *closed circuit television (CCTV)*, kartu pengenalan pengemudi (*ID card driver*) dan tombol *hazard*. Keselamatan, misalnya ada SOP Pengoperasian kendaraan, SOP Keadaan Darurat. Kenyamanan, misalnya suhu dalam bus, kebersihan, lampu penerangan. Keterjangkauan, misal aksesibilitas mudah, tarif yang murah. Kesetaraan, misal ketersediaan kursi prioritas. Keteraturan, misalnya waktu tunggu yang pasti, kecepatan perjalanan dan waktu berhenti di



Bus Batik Solo Trans siap melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Kota Solo melalui skema *Buy The Service*. Skema ini diimplementasikan dengan aplikasi Teman Bus. Masyarakat dapat menggunakan jasa transportasi ini tanpa dipungut biaya. Foto: HMS DJPD

halte. Kesehatan, misal memasang kamera yang dapat mendeteksi suhu tubuh penumpang masuk ke dalam bus, armada bus disemprot disinfektan sebelum beroperasi.

### **Push and Pull Strategy**

**Push strategy** (strategi mendorong) dilakukan Pemda untuk mendorong masyarakat menggunakan bus. Manajemen ruang dan waktu akses kendaraan pribadi yang mengatur adalah pemerintah daerah. Manajemen ruang dalam bentuk pengaturan ruang jalan, misalnya melarang parkir di tepi jalan atau menaikkan tarif parkir di jalan-jalan yang berada di pusat kota.

**Pull strategy** (strategi menarik) dilakukan Pemerintah Pusat untuk menarik masyarakat menggunakan bus. Pemerintah menjadi penanggung resiko penyediaan

layanan angkutan dikarenakan tingginya Biaya Operasional Angkutan Massal. Pemerintah memberikan lisensi pelaksanaan pelayanan kepada operator yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah memberikan prioritas kepada angkutan umum supaya memiliki keunggulan dibandingkan kendaraan pribadi.

### **Jalur Akses Pelanggan**

Website, informasi lengkap tentang layanan Teman Bus yang dapat diakses oleh masyarakat. Mulai dari info rute, halte, peta, *link download* aplikasi, FAQ.

Sosial media dan *call center*, Akses informasi tentang layanan Teman Bus yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Sosial Media (facebook, Instagram dan twitter) serta *call center* yang bisa di hubungi pada jam operasional.

Aplikasi mobile, aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat atau pengguna untuk mendapatkan informasi *real-time* posisi, dan jadwal Teman Bus. Pada aplikasi mobile, pelanggan juga dapat memberikan input/pertanyaan di kolom Kontak Kami.

Masyarakat di Kota Palembang dengan Trans Musinya telah menikmati jenis layanan ini sejak 2 Juni 2020. Kemudian, pada Juli 2020 masyarakat Kota Solo juga menikmati layanan gratis Bus Solo Trans (BTS). Sementara tiga kota berikutnya (Yogyakarta, Medan dan Denpasar) di periode selanjutnya akan menyusul turut menikmati layanan yang sama.

Pemerintah telah hadir melayani kebutuhan mobilitas akan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, selamat dan sehat.\*



TEMAN BUS merupakan implementasi program *Buy the Service* dari Kementerian Republik Indonesia untuk pengembangan angkutan umum di kawasan perkotaan berbasis jalan yang menggunakan teknologi telematika yang andal dan berbasis non tunai untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan serta kenyamanan mobilisasi Anda. Tujuan utama TEMAN BUS adalah memberikan Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu TEMAN BUS memiliki standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.



**Hemat**  
Naik TEMAN BUS memang paling HEMAT. Tidak perlu khawatir saldo kartu non tunai Anda 0, karena naik TEMAN BUS GRATIS lho!



**Mudah**  
Tidak perlu khawatir ketinggalan TEMAN BUS, cukup buka aplikasi dan langsung cek jadwal perjalanan TEMAN BUS. MUDAH kan!



**Nyaman**  
Naik TEMAN BUS dijamin Nyaman! Karena dilengkapi fasilitas yang bersih dengan layanan terbaik. TEMAN BUS

mendukung protokol kesehatan, serta memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.

TEMAN BUS memberikan tarif yang sangat terjangkau. Tidak hanya itu, dilengkapi juga dengan aplikasi mobile untuk memudahkan penumpang untuk mendapatkan informasi rute, halte dan jadwal keberangkatan bus. Dengan demikian TEMAN BUS diharapkan bisa menjadi angkutan dengan layanan terbaik di Indonesia.\*

Untuk kemudahan akses penumpang melihat rute perjalanan, informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan Bus secara real time dapat melalui aplikasi TEMAN BUS yang bisa di unduh di *playstore* dan *appstore*.





Wali Kota Palembang H Harnojoyo saat meninjau langsung satu unit armada bus pada peluncuran "Teman Bus" di Palembang, (2/6/2020).

# TEMAN BUS HADIR DI PALEMBANG

**Pengoperasian Aplikasi Teman Bus ini menjadi layanan pertama di Kota Palembang yang hadir dalam program *Buy The Service* (BTS) dan bekerja sama dengan PT Transmusi Palembang Jaya. Teman Bus merupakan kepanjangan dari "Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman".**

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan peresmian Teman Bus yaitu layanan transportasi perkotaan berbasis jalan di Palembang, Sumatera Selatan pada hari ini, Selasa (2/6). Melalui kegiatan yang digelar secara online ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dengan didampingi oleh Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Imran Rasyid menyaksikan Walikota Palembang Harnojoyo mencoba salah satu bus saat acara peluncuran Teman Bus.

Pengoperasian Teman Bus ini menjadi layanan pertama di

Kota Palembang yang hadir dalam program *Buy The Service* (BTS) dan bekerja sama dengan PT Transmusi Palembang Jaya. Teman Bus merupakan kepanjangan dari "Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman", hadir sebagai Angkutan Bus Rapid Transit (BRT) untuk penunjang mobilisasi masyarakat yang terintegrasi dengan layanan angkutan massal LRT yang sudah tersedia di Palembang. Teman Bus juga hadir juga untuk mendukung Trans Musi sebagai layanan BRT dari Pemerintah Kota Palembang yang sudah lebih dahulu hadir di Palembang sejak tahun 2010.

"Ini pertama kali kami lakukan. Palembang merupakan yang pertama diantara 5 kabupaten/

kota yang mendapatkan program *Buy The Service* (BTS) di Indonesia," kata Dirjen Budi. Kota lainnya yang menjadi sasaran program BTS yakni Solo, Yogyakarta, Denpasar, dan Medan.

Layanan Teman Bus di Kota Palembang tersedia sebanyak 45 unit, yang melayani di 3 koridor, yaitu Koridor 1 Terminal Alang Alang Lebar - Dempo, Koridor 2 Asrama Haji - Terminal Sako dan Koridor 3 Terminal Plaju - Pasar Induk Jakabaring. Teman Bus berupa kendaraan bus sedang yang berkapasitas 40 penumpang dengan 20 tempat duduk serta bus besar yang berkapasitas 60 penumpang dengan 30 tempat duduk serta kursi prioritas. Setiap bus mempunyai 1 pintu masuk di bagian depan dengan *low deck* dan 1 di pintu bagian tengah adalah *high deck*.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Budi menilai bahwa Palembang dipilih karena siap secara organisasi, infrastruktur, maupun operasionalnya. "Untuk itu kami berikan apresiasi yang baik atas kemitraan yang terjadi antara Ditjen Hubdat dengan Kota Palembang. Ini adalah salah satu pengembangan kami di Ditjen Hubdat yang merupakan *pilot project*, pertama kali diselenggarakan di Indonesia atas

pelayanan angkutan umum moda transportasi massal tapi dengan menggunakan skema BTS dan sudah direncanakan sejak 2 tahun lalu. Mudah-mudahan ini cocok dengan skema kita selanjutnya," jelas Dirjen Budi.

Untuk saat ini, masyarakat yang ingin menggunakan Teman Bus tidak dikenakan biaya. Pemerintah memberikan subsidi penuh terhadap biaya operasional layanan yang dilaksanakan oleh operator dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan inilah yang menjadi acuan pelayanan operator untuk layanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga diharapkan lebih banyak penumpang yang beralih ke moda transportasi publik

"Awalnya kita kembangkan dengan skema bantuan tapi kalau ada komitmen baik dari Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar ke depannya. Ini adalah kemitraan yang baik terlebih karena respon yang cepat dari Pemerintah Kota Palembang. Selanjutnya kita akan melakukan riset dan evaluasi terhadap apa yang kita kerjakan, saya yakin dan percaya dengan perkembangan teknologi masa kini termasuk ekspektasi masyarakat apalagi dengan kondisi saat ini," ucap Dirjen Budi.

Selain itu, selama ini angkutan umum hanya mengenal 3 aspek yaitu pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan. Namun dengan adanya protokol kesehatan karena Covid-19, maka aspek kesehatan harus menjadi prioritas. "Nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi transportasi, apa yang harus dilengkapi, sehingga ke depannya masyarakat ada kebiasaan baru dalam penggunaan transportasi umum," lanjutnya.

Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, pelayanan transportasi yang dihadirkan juga diikuti



dengan pelaksanaan protokol kesehatan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Protokol kesehatan tersebut antara lain pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat duduk dan ruang berdiri, penumpang wajib menggunakan masker dan penyediaan hand sanitizer di dalam bus.

"Harapannya apa yang sedang kita kerjakan ini nanti dapat dikembangkan lebih lanjut karena ke depan kita akan mencoba selanjutnya untuk melakukan evaluasi serta melakukan pengembangan terhadap fasilitas di sekitar koridor yang sudah tersedia. Misalnya pada trotoarnya, jembatan penyeberangan orang

(JPO), maupun *shelter*-nya akan diperbaiki lagi. Satu tahun ini kita masih uji coba sehingga subsidiya cukup besar dan masyarakat tidak dikenakan tarif dengan harapan terjadi perubahan cukup besar yakni mengubah pola pikir masyarakat yang selalu bergantung pada kendaraan pribadinya," urai Dirjen Budi.

Aplikasi Teman Bus saat ini bisa diunduh di Playstore. Untuk dapat menggunakan Teman Bus, dapat membuka aplikasinya setelah diunduh. Kemudian tunggu bus di halte terdekat dari posisi Anda yang tertera di aplikasi, siapkan kartu non tunai, lalu naik dan tempelkan kartu non tunai pada perangkat reader yang ada di dalam bus.(\*)

# PERISAI SEBAGAI SEKAT PENYELAMAT

Oleh: **Djoko Setijowarno** (Pengamat Transportasi)

## Penggunaan perisai yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan pada ojek sepeda motor bertujuan untuk melindungi pengemudi dan penumpang dari risiko tertular Covid-19.

Moda angkutan jalan menjadi pelayanan yang paling mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan karena perannya yang sangat vital pada kehidupan sehari-hari. Di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini, pemerintah dan juga penyedia jasa angkutan umum diharuskan memberi perhatian secara khusus pada dua aspek utama.

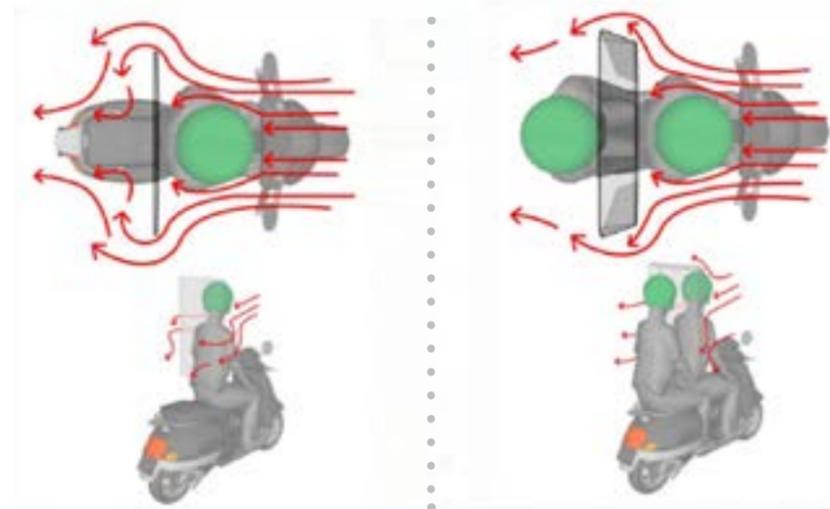
Yang pertama aspek keselamatan transportasi dan yang kedua harus memberi perhatian yang tinggi pada aspek kesehatan, baik kesehatan bagi awak kendaraan maupun kesehatan pengguna, sehingga tidak terjadi penularan COVID-19.

Pengaturan untuk moda angkutan yang legal, seperti bus besar, bus sedang, mini bus, taksi, hingga kendaraan roda tiga (contoh bajaj), pemerintah membatasi faktor muat hingga maksimum 70 % saja. Hal itu mengingat adanya keharusan "jaga jarak" antar penumpang.

Kemudian bagaimana pengaturan terhadap angkutan yang ilegal (ojek)? Sudah barang tentu ojek (pangkalan/OPANG maupun berbasis aplikasi/OJOL) tidak memungkinkan menerapkan ketentuan "jaga jarak" antara pengemudi dan penumpang. Atas dasar kenyataan tersebut maka kita ketahui bersama pula melalui pemberitaan di berbagai media bahwa ada salah satu kelompok OJOL yang berinisiatif merancang

suatu penyekat yang memisahkan antara pengemudi dan penumpangnya.

Namun bagaimana bentuk, ukuran, dan bahan dasar pembuatan penyekat tersebut masih menjadi pertanyaan. Belum lagi jika dikaitkan dengan aspek keselamatan dan kesehatan, maka timbul pertanyaan lanjutan mampukah penyekat tersebut menciptakan rasa aman/ selamat bagi pengemudi dan penumpang, serta seberapa besarkah tingkat kemampuan penyekat tersebut mencegah penularan COVID-19? Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab oleh regulator, baik terkait aspek keselamatan maupun aspek kesehatan. Karena bertransportasi menggunakan



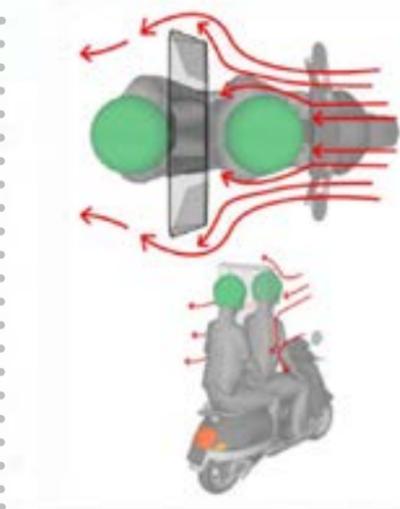
**Perisai Rata**  
- tidak aerodinamis  
- droplet dapat mengenai penumpang

sepeda motor memiliki risiko kecelakaan dengan tingkat fatalitas paling tinggi dibandingkan dengan sarana angkutan yang lainnya.

Perlunya keterlibatan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap wacana perisai (*shield*) yang merupakan pembatas antara pengemudi dan penumpang bukan berarti KNKT mendukung pengoperasian sepeda motor sebagai kendaraan umum.

KNKT memberikan tanggapan atas desain *shield* yang saat ini telah dikembangkan oleh pihak aplikator dari sudut pandang keselamatan.

Pertama, terkait desain aerodinamis, keberadaan *shield* disamping dapat meminimalisir penularan Covid 19 melalui kontak fisik langsung antara pengemudi dan penumpang serta penyebaran percikan liur (*droplet*) saat salah satu di antara keduanya bersin atau batuk, *shield* dimaksud juga tidak mengganggu keseimbangan/gaya aerodinamis kendaraan saat berjalan. Oleh sebab itu, desainnya perlu dibuat lengkung di atasnya dan diberi penambahan lengkung pada sisi kanan kirinya.



**Perisai Melengkung**  
- aerodinamis  
- droplet tidak mengenai penumpang

Kedua, pertimbangan *crashworthiness*, jika sampai terjadi benturan maka *shield* tersebut tidak akan melukai baik pengemudi maupun penumpangnya. Oleh sebab itu material *shield* selain ringan dan kuat juga harus dibuat dari benda yang jika pecah tidak menjadi benda tajam, dan sekitarnya diberi lapisan karet pelindung. Untuk itu, KNKT menyarankan agar desain perisai (*shield*) diuji coba terlebih dahulu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut.

Kekurangan pada desain terdahulu selain dapat mengganggu efek aerodinamika kendaraan saat melaju, jika pengemudi bersin atau batuk masih ada kemungkinan droplet dapat masuk ke arah penumpang di belakangnya.

KNKT mengusulkan agar sekat dibuat lengkung dan penambahan pada sisi kanan dan kirinya, agar aliran udara pada saat sepeda motor melaju dapat mengikuti gerak aerodinamika dan tidak menjadi hambatan.

Selain itu juga jika pengemudi bersin, maka droplet akan mengikuti aliran udara dan tidak mengenai penumpang di belakangnya. Kesehatan dan keselamatan pengemudi dan penumpang terlindungi.

**Perlindungan konsumen**  
Menilik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, menyebutkan hak konsumen adalah (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Pasal 7, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan



Pengemudi ojek daring mengenakan sekat pelindung saat menunggu penumpang di kawasan jalan Kendal, Jakarta, Rabu (10/6/2020). Penggunaan sekat pelindung untuk pembatasan antara pengemudi dan penumpang tersebut sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir risiko penyebaran virus COVID-19 dalam menghadapi era normal baru. ANTARAFOTO/Galih Pradipta

## Sekat Ojol Sesuai Rekomendasi KNKT

Kementerian Perhubungan (Kemenuh) sudah memperbolehkan ojek online (ojol) beroperasi di Jakarta namun harus menggunakan penyekat antara pengemudi dan penumpang. Meski sudah beroperasi kembali sejak awal Juni 2020 di Jakarta, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kemenhub memperbaiki desain penyekat yang digunakan ojol.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan desain penyekat untuk operasional ojek online (ojol) saat masa pandemi Covid-19 sesuai dengan perbaikan yang direkomendasikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Dirinya memastikan, sudah membahas perbaikan desain penyekat ojol tersebut dengan aplikator.

"Sudah dikoordinasikan lebih lanjut dengan aplikator dan sekarang tinggal pembuatan dalam jumlah banyak oleh aplikator," kata Dirjen Budi.

Sebelumnya, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan, sudah

memperbaiki desain penyekat yang saat ini dibuat oleh aplikator. Penyekat tersebut digunakan sebagai pembatas antara penumpang dan pengemudi ojol untuk meminimalisir penularan Covid-19 melalui droplet. Soerjanto menjelaskan, desain penyekat perlu diperbaiki karena untuk menghindari terjadinya ulakan saat menerpa angin. Soerjanto mengatakan desain penyekat tidak boleh menimbulkan ulakan sehingga udara dari depan atau pengemudi tidak mengenai penumpang.

Untuk itu, kata dia, KNKT memperbaiki desain penyekat ojol lebih *aerodynamic*. "Jika timbul ulakan terjadinya di belakang penumpang dan bahan juga harus dipilih agar ketika terjadi kecelakaan *worthiness*-nya terpecah," jelas Soerjanto.

Dia menambahkan, pada dasarnya, desain penyekat diperbaiki agar dapat menghindari penularan Covi-19. Selain itu tujuan kedua yakni penyekat harus memenuhi aspek *crashworthiness*.(\*)

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Kewajiban pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi pengemudi dan penumpang menggunakan ojek daring agar tidak tertular virus Covid-19. Sebaiknya, pemerintah

menahan dulu pengoperasian ojek daring membawa penumpang dengan menggunakan perisai (*shield*) yang belum mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dari instansi yang berkompeten. Ketimbang nantinya muncul klaster baru dari pengoperasian ojek daring. (\*)

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikenal ada dua macam pengujian kendaraan bermotor, yaitu pengujian tipe dan pengujian berkala. Pengujian tipe wajib dilakukan pada setiap kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan beroperasi di jalan. Di Indonesia, pengujian tipe kendaraan bermotor dilakukan di BPLJSKB (Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor).

Selanjutnya pengujian berkala atau yang sering disebut uji kir yaitu pengujian yang wajib dilakukan pada kendaraan bermotor dengan jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang beserta kereta gandengan atau kereta tempelan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pengujian berkala dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kabupaten/kota atau pun bengkel swasta yang bersertifikasi dan memenuhi persyaratan. Dalam pengujian berkala dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui persyaratan teknis dan kelaikan jalan apakah terdapat perubahan/modifikasi teknis pada kendaraan. Kemudian juga dilakukan pengujian laik jalan untuk mengetahui apakah fungsi ataupun sistem pengendali pada kendaraan masih dapat memenuhi ambang batas laik jalan. Selain itu juga dilihat apakah ada perubahan data kepemilikan. Apabila secara administrasi dan teknis kendaraan tersebut dinyatakan lulus maka kendaraan tersebut dapat tetap diijinkan untuk beroperasi di jalan dan dari sisi teknis kendaraan tidak memiliki potensi yang dapat membahayakan penggunaan kendaraan tersebut di jalan.

Melalui pengujian tipe dan pengujian berkala diharapkan seluruh kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan akan memiliki riwayat atau



Petugas memasukkan data kendaraan saat proses uji kir di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tandes, Surabaya, Kamis (8/9/2018). ANTARA FOTO/Moch Asim/foc/16.

# DIGITALISASI BUKU UJI KENDARAAN BERMOTOR DAN BIG DATA

**Keberadaan dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor komersial di Indonesia, diikuti data teknis dan data kepemilikannya adalah kumpulan data yang besar volumenya, pesat pertumbuhannya, dan beraneka ragam formatnya. Boleh dikata, kumpulan data tersebut adalah *big data*.**

rekam jejak yang lengkap dan terukur. Mulai dari data teknis/spesifikasi teknis kendaraan sejak kendaraan tersebut lahir, baik yang diimpor, dibuat/dirakit atau dimodifikasi, termasuk hasil uji kendaraan hingga kendaraan tersebut dinyatakan lulus dan

dapat dioperasikan di jalan. Tak ketinggalan pula data kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.

### Proses Digitalisasi dan Migrasi Data

Kelengkapan dan validitas data teknis, hasil uji, pemilik dan

jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sangatlah penting untuk dimiliki secara menyeluruh agar dapat digunakan atau diolah dengan cepat dan praktis untuk berbagai kepentingan. Tentunya di era digital ini tidaklah efektif apabila data tersebut masih dalam bentuk manual. Demikian pula jika buku atau dokumen berupa lembaran kertas, sangat riskan terjadi kebocoran data dan mudah dipalsukan. Ditambah lagi dinamika perubahan data berikut jumlah pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari waktu ke waktu akan selalu terus meningkat. Di sinilah diperlukan adanya migrasi data dari manual menuju ke data digital. Hal ini tentu harus juga ditunjang dengan infrastruktur digital yang memadai, baik dari segi pengamanan data, kecepatan akses data, koneksi jaringan dan lain sebagainya. Jaminan keamanan data juga penting untuk mencegah kebocoran data, pemalsuan data dan kendala teknis lainnya yang terkait dengan data informasi kendaraan bermotor.

## PERBEDAAN BUKU UJI DAN BLUE



- Pengesahan konvensional
- Mudah dipalsukan



- Dilengkapi SAM (*Secure Access Module*)
- Pengesahan *Digital Sign*
- Penguji diberi otoritas yang harus dipertanggungjawabkan

Saat ini proses migrasi data tersebut sedang berjalan yakni berupa peralihan data pengujian berkala kendaraan bermotor yang semula tersebar di unit-unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di berbagai daerah menjadi terintegrasi di pusat. Data pengujian berkala tersebut juga akan terhubung dengan data pengujian tipe kendaraan bermotor. Semula, bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji dengan data yang masih diinput secara manual. Buku semacam ini memiliki banyak potensi untuk disalahgunakan. Digitalisasi buku uji kendaraan bermotor menjadi BLUE (Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik) mengintegrasikan data teknis, hasil uji, dan pemilik kendaraan bermotor, serta data uji tipe. Dari segi efisiensi tentunya dengan adanya BLUE ini akan lebih mempermudah penerbitan bukti lulus uji sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya terkait dengan tanda tangan pejabat yang mengetahui apabila terdapat rotasi dapat segera berubah sesuai dengan kondisi aktual, selain itu tidak memerlukan banyak tempat untuk menyimpan dokumen hasil uji. Kegiatan pengawasan di lapangan pun dapat terlaksana dengan cepat dan akurat. Selain itu dengan BLUE dapat diperoleh data yang lengkap dan valid mencakup riwayat atau rekam jejak data teknis/spesifikasi kendaraan bermotor

sejak kendaraan tersebut dibuat, diuji, dimiliki dan selanjutnya dioperasikan.

Dilengkapi dengan teknologi pengamanan data digital agar tidak mudah dipalsukan, kumpulan data yang banyak jumlahnya, dinamis pertumbuhannya, dan beraneka ragam formatnya akan menghasilkan apa yang disebut dengan *Big Data*. Kumpulan data ini dapat digunakan oleh instansi lain yang berkepentingan misalnya jika suatu saat nanti ada kehilangan, kecelakaan ataupun hal lainnya yang melibatkan kendaraan bermotor. Ditambah lagi, melalui *big data* tersebut dapat diketahui persebaran kendaraan yang ada di wilayah Indonesia. Data persebaran kendaraan dapat digunakan untuk membuat kebijakan agar penyebaran kendaraan bermotor lebih merata atau pun untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah. Dengan berbagai manfaat tersebut maka sudah selayaknya perubahan ini dapat didukung dan terlaksana untuk membangun tata kelola transportasi yang semakin baik. Dukungan tersebut tentunya tidak saja hanya dari pemerintah namun dari berbagai kalangan, baik dunia usaha, para pelaku industri kendaraan bermotor, dan masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan bermartabat. (\*)

# FERIZY, SISTEM TIKET ONLINE ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Layanan Ferizy turut mendukung kebijakan Pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19 melalui *physical distancing*, dimana dengan membeli tiket secara online maka dapat mengurangi interaksi pengguna jasa dengan petugas loket.

Ferizy merupakan layanan tiket berbasis online yang dapat diakses oleh pengguna jasa melalui website [www.ferizy.com](http://www.ferizy.com) atau aplikasi di ponsel. Sejak diterapkan mulai 1 Mei 2020 di 4 (empat) pelabuhan utama ASDP, yakni Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk, antusiasme pengguna jasa ferry yang membeli tiket online melalui Ferizy terus meningkat.

Di masa Pandemi, layanan Ferizy ini juga mendukung kebijakan

Pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19 melalui *physical distancing*, dimana dengan membeli tiket



penumpang lebih terjamin (hak asuransi), dan mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 karena mengurangi interaksi dengan petugas loket.

secara online maka dapat mengurangi interaksi pengguna jasa dengan petugas loket.

Keuntungan membeli tiket ferry secara online, pengguna jasa tidak perlu antri lagi beli tiket di pelabuhan, manifest

Kehadiran aplikasi reservasi tiket online Ferizy, menjadi bagian dari peningkatan pelayanan bagi wisatawan maupun pelaku ekonomi kreatif dalam mobilitas antarpulau di Indonesia, Terlebih, di era industri 4.0 saat ini yang juga semakin terdorong oleh pandemi dimana disrupsi digital lebih cepat dari yang seharusnya terjadi.

Pembelian tiket via online bisa melalui ponsel dan dapat beli tiket mulai H-60 hingga maksimal 5 jam sebelum keberangkatan. Apalagi, di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, pengguna jasa harus senantiasa menjaga jarak (*physical distancing*) sehingga dengan membeli tiket secara online, maka akan semakin mengurangi interaksi dengan petu-



Atas: Sebuah kapal ferry hendak bersandar di Pelabuhan Penyeberangan. Samping: Tata cara pembelian tiket ferry online dengan aplikasi Ferizy. Sumber: PT. ASDP

TATA CARA PEMBELIAN TIKET FERRY ONLINE

- 1.**

Download aplikasi FERIZY di Google Play Store, atau buka web [www.ferizy.com](http://www.ferizy.com)

**2.**

Login atau daftar sesuai e-mail Anda
- 3.**

Pilih jadwal keberangkatan  
\*Pastikan isi GOLONGAN KENDARAAN dengan benar

**4.**

Isi data seluruh penumpang & kendaraan sesuai kartu identitas  
\*Wajib diisi secara BENAR & LENGKAP
- 5.**

Konfirmasi pesanan Anda & Lakukan pembayaran di:  
ATM/Link Aja/ Alfamart/ Yomart/ Kantor Pos/ Pegadaian Mobile/ Internet Banking

**6.**

E-tiket dikirim ke e-mail Anda. Tunjukkan/scan QR-Code di pelabuhan untuk mendapatkan boarding pass

**1** Pembelian tiket ferry online dapat dilakukan H-60 hingga maksimal 5 jam sebelum keberangkatan.

**2** Pengguna jasa yang sudah membeli tiket ferry online, dapat memasuki area pelabuhan 2 jam sebelum keberangkatan.

gas loket. Pembelian tiket online secara mandiri melalui website maupun aplikasi tidak hanya mudah dan nyaman, tetapi pencatatan data manifest semakin akurat sebagai dasar klaim asuransi konsumen yang menjadi hak pengguna jasa melalui PT Jasa Raharja.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan, "Apa yang dilakukan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat kepada kita untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk menggunakan teknologi. Saya juga berterima kasih kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang telah membangun aplikasi Ferizy untuk sistem pemesanan dan pembayaran tiket di penyeberangan." Dirinya berharap, dengan cara ini pelanggan dapat membiasakan diri menggunakan teknologi untuk pemesanan tiket. "Tahapan berikutnya bisa dilaku-

kan pembayaran di gerai retail terdekat seperti Alfamart," ujar Dirjen Budi.

Selain melalui Ferizy, pengguna jasa kini dapat membeli tiket ferry di seluruh gerai Alfamart sebagai mitra resmi penjualan tiket ASDP dengan biaya admin mulai dari Rp 1.000 sampai dengan Rp5.000 disesuaikan dengan jumlah nominal per transaksi. Bagi yang membeli tiket di Alfamart, hanya perlu menyiapkan ID berupa nomor KTP/SIM/Paspor penumpang serta pastikan jenis golongan kendaraan yang dibawa.

Senada dengan hal tersebut, Ira Puspawati, Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), mengatakan, "Selama ini kita

pakai metode *go show* di mana orang datang dan bisa beli tiket. Tapi ada 2 hal yang menjadi masalah yaitu kalau masa *peak season* seperti liburan dan masa Angkutan Lebaran maupun Natal Tahun Baru, maka keadaan tidak terkendali. Kemudian, kalau tidak diatur maka akan memburuk bagi pengguna jasa apalagi jalan tol dari Palembang sudah semakin mulus menuju Bakauheni. Problemnya makin buruk yaitu tidak dapat dilakukan pencatatan manifest yang efisien dan antrian makin panjang. Ini harus berubah di mana tujuan akhirnya adalah kepastian, kenyamanan, dan keperluan untuk menjaga *physical distancing* bagi para pengguna."(\*)



## INFO PRASARANA

Pemilihan Terminal Ahmad Sanusi Sukabumi ini didasari beberapa alasan yakni Kota Sukabumi dipandang sebagai pusat pertumbuhan bagian Selatan tengah wilayah Jawa Barat. Terminal Ahmad Sanusi juga merupakan Terminal Tipe A yang melayani perjalanan hingga lintas Pulau Sumatera. Selain itu Kota Sukabumi memiliki sektor pariwisata sebagai sektor andalan perekonomian Kota Sukabumi, sehingga perlu dukungan sarana dan prasarana yang menunjang.

“Harapan kami tentu berdasarkan makna pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya terminal ini dapat menambah kenyamanan terhadap pelayanan kami. Kalau kita lihat di Eropa, atau negara tetangga Malaysia dan Singapura maka konsep terminal mixed use dengan hub khusus. Dengan demikian harapan kami dapat di back up sepenuhnya oleh Kemenkeu, meski demikian saya pahami Kemenkeu punya penghitungan sendiri. Kami juga siap untuk diajak berdiskusi selama di lapangan,” kata Dirjen Budi.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi memahami bahwa dalam proses kerjasama ini, terminal berbeda dengan proyek infrastruktur lainnya, terlebih pelayanan di terminal adalah untuk masyarakat ekonomi ke bawah.

“Dengan rencana yang kita bangun semoga dapat membangun atmosfer terminal yang betul-betul baik, nyaman, dan membanggakan masyarakat Sukabumi. Setelah di Sukabumi akan dikerjakan nanti dengan skema serupa di Pekalongan dan Serang. Sebelum ada penilaian, saya harap ada pendalaman terhadap bagaimana terminal itu ada dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi untuk kepentingan bangsa kita dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.\*

## PERAN PENTING PENILAIAN KERJASAMA PEMANFAATAN TERMINAL SUKABUMI

**Hadirnya Terminal Sukabumi yang dibangun dengan konsep city hub ini maka dapat menambah nilai dan fungsi terminal bagi masyarakat Sukabumi.**

Kementerian Perhubungan saat ini selangkah lebih dekat lagi dengan pembangunan Sukabumi City Hub yakni pembangunan fasilitas modern dengan hadirnya mall dan hotel yang terintegrasi Terminal Ahmad Sanusi, Sukabumi. Pada Senin sore (22/6), Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menghadiri Penilaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMN oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada Terminal Ahmad Sanusi Sukabumi.

“Saya memandang pentingnya proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang pertama kali di Sukabumi ini. Pemerintah saat ini tengah mendorong beberapa skema dengan proyek kerjasama seperti ini. Melalui kerjasama ini diharapkan pihak swasta dapat masuk dan pemerintah dapat pembiayaan sekaligus dapat keuntungan dari kerjasama ini. Saya tegaskan bahwa kerjasama ini tidak hanya semata untuk Kementerian Perhubungan namun untuk pemerintah secara keseluruhan,” jelas Dirjen Budi mengenai acara yang dihadapinya hari ini di Hotel Horison Sukabumi, Jawa Barat tersebut.

Menurutnya, dalam proses penilaian ini, peran dari Kementerian Keuangan sangat besar, terlebih berkaca dari proyek kerjasama sebelumnya di Terminal Tirtonadi di Solo, Jawa Tengah. “Menurut saya yang berperan besar dalam proses ini adalah Kementerian Keuangan. Belajar dari pengalaman yang di Solo beberapa kali, namun ternyata angkanya tidak sesuai dengan kemampuan calon investornya. Sebelumnya kita telah melalui proses lelang sebanyak 2 kali, penawarannya ada namun gagal. Semoga hal tersebut tidak terjadi di Sukabumi dan kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik,” tambah Dirjen Budi dengan optimis.

Dirjen Budi menjelaskan bahwa dengan hadirnya Terminal Sukabumi yang dibangun dengan konsep city hub ini maka dapat menambah nilai dan fungsi terminal bagi masyarakat Sukabumi.

“Saya berharap peran serta dari Kemenkeu, yang perlu kita ingat adalah pemasukan pemerintah berarti peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat melalui kehadiran terminal. Kalau ini gol, maka akan kita ingat bahwa ini pertama kali revolusi terhadap pembangunan fisik terminal yang tidak mengandalkan APBN,” ujar Dirjen Budi.

## INFO SELINTAS

### TSDP DITJEN HUBDAT OPERASIKAN 1 DERMAGA DI PADANGBAI UNTUK URAI ANTREAN KENDARAAN



Pasca musibah kandasnya KMP. Dharma Rucitra III milik PT. Dharma Lautan Utama di Dermaga II Padangbai pada Jumat (12/6) lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memastikan bahwa lintasan Padangbai-Lembar tetap beroperasi. Usai melakukan buka tutup layanan, kini layanan di lintasan Padangbai-Lembar telah dibuka kembali walau

hingga saat ini yang beroperasi hanya 1 Dermaga saja.

“Dengan kejadian kandasnya KMP. Dharma Rucitra di Dermaga II, kami tetap membuka pelayanan operasional di Dermaga I untuk mengurangi antrean kendaraan. Berdasarkan informasi pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) juga akan menyediakan 18 unit kapal untuk lintas Padangbai-Lembar mulai tadi malam, Minggu (14/6) pukul 00.00 WITA,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan menyusul penutupan sementara Dermaga II Pelabuhan Padangbai. “Sejak Sabtu (13/6) kemarin, karena KMP. Dharma Rucitra III kandasnya di Dermaga II, maka Dermaga II ditutup sementara dan hanya 1 Dermaga saja yang beroperasi. Dermaga II akan ditutup sampai kapal dapat dipindahkan dari titik lokasi kandasnya,” jelas Dirjen Budi.

### ANGKUTAN PASTIKAN PROTOKOL KESEHATAN, DIRJEN PER- HUBUNGAN DARAT TINJAU TERMINAL PULOGEBAWANG



Kementerian Perhubungan telah menerbitkan SE 11 Tahun 2020 Tentang Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi meninjau implementasi kebijakan tersebut di Terminal Pulo Gebang, Jakarta (17/6).

“Hari ini saya mau melihat bagaimana tingkat kepatuhan dari operator bus terhadap SE 11 Tahun 2020,” kata Dirjen Budi. “Saya lihat tidak begitu banyak masyarakat yang melakukan perjalanan, mengapa demikian, saya kira salah satu sebabnya adalah memang untuk keluar atau masuk DKI Jakarta harus memiliki SIKM sebagaimana Per-gub. No. 47 Tahun 2020,” lanjutnya.

Dirjen Budi juga menyampaikan bahwa sebelumnya dirinya telah mengecek seberapa jauh aplikasi maupun pengemudi ojek memenuhi ketentuan surat edaran tersebut. “Kedua aplikasi tersebut telah memiliki beberapa pos kesehatan, pada kendaraannya dilakukan penyemprotan disinfektan, pengemudi mendapat pembagian masker, pengukuran suhu tubuh menggunakan termogun dan sebagainya,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Budi berkesempatan naik ke dalam bus AKAP Sinar Jaya trayek Jakarta-Purworejo PP. Dirinya menyampaikan informasi kepada para penumpang dan pengemudi bahwa saat ini pemerintah masih sangat ketat dalam protokol kesehatan, sama seperti moda transportasi lainnya.

Dirjen Budi mengatakan, “Nanti pada tanggal 1 Juli, untuk kapasitas mobil (bus) kita sudah membuka peluang hingga 70%.” Dalam SE 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru dilakukan melalui beberapa tahapan fase. Dan Fase ke 2 akan dimulai pada 1 Juli 2020, dimana load factor angkutan umum diperbolehkan hingga maksimum 70%. Dirinya berharap masyarakat yang akan melakukan perjalanan tetap menerapkan protokol keseha-

Meski demikian, menurut Dirjen Budi sempat terjadi penumpukan kendaraan terlebih ramainya truk yang akan melintas pada saat malam hari. “Memang sempat terjadi antrean kendaraan masuk sejak Sabtu pagi sampai sore. Namun antrean saat ini sudah berhasil dipecah salah satunya karena dari ASDP melakukan model pelayanan baru sehingga kondisi di lapangan mulai normal dan sudah berkurang antreannya,” urai Dirjen Budi.

“Di lintasan Padangbai-Lembar ini cukup banyak melayani angkutan logistik maupun penumpang yang akan melintas dari Bali ke Lombok, jadi harapan kami semoga musibah ini dapat segera diatasi dan ditangani, terlebih kapal yang kandas dapat segera dipindah sehingga pelayanan di Padangbai-Lembar berangsur pulih kembali dan dapat melayani maksimal dengan 2 Dermaga nantinya,” pungkaskan Dirjen Budi.\*

“Surat Edaran dari Gugus Tugas masih berlaku, dan kita semua mengacu kesana,” tambahnya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut diantaranya dijelaskan tentang kriteria dan persyaratan orang yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi umum harus memenuhi berbagai persyaratan administratif selain wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan.

Menurutnya pihak operator juga harus ketat dalam hal protokol kesehatan seperti melakukan penyemprotan kendaraan, pengemudi wajib rapidtest yang masih berlaku. “Kemudian penumpangnya wajib pakai masker selama perjalanan, menerapkan protokol kesehatan, dan memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan,” imbuhnya.

Terkait tarif, Dirjen Budi menyampaikan bahwa dengan kapasitas angkut penumpang yang nanti diperbolehkan hingga 70%, artinya sudah balik modal, maka seharusnya tidak ada potensi kenaikan tarif. “Sesuai arahan Pak Menteri Perhubungan, angkutan umum tidak boleh naik tarif,” jelasny.\*

LALIN

**DIRJEN HUBDAT APRESIASI UPAYA PENYEKATAN YANG DILAKUKAN PETUGAS LINTAS INSTANSI**



Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada segenap petugas lintas instansi yang telah berusaha untuk melakukan penyekatan terhadap masyarakat yang akan menuju Jakarta. Hal ini disampaikannya saat menggelar rapat koordinasi Antisipasi Arus Balik dengan Walikota Cirebon, Kapolresta Kabupaten Cirebon, Kapolres Kota Cirebon, dan Kapolres Brebes pada Sabtu (30/5) lalu.

“Yang pertama kunjungan saya ini menyampaikan pesan dari Bapak Menteri Perhubungan, beliau menyampai-

kan terima kasih kepada jajaran Kepolisian terutama Polres Cirebon Kota dan Kabupaten sampai Brebes. Tidak lupa juga atas dukungan dari Pemerintah Kota Cirebon yang bersama-sama tugas di lapangan. Terhitung mulai Sabtu (30/5) hingga Senin (1/6) nanti kami prediksi ada sedikit peningkatan jumlah orang yang mau ke Jakarta. Menurut beliau (Menhub) pun kinerja Polri sudah cukup bagus mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Artinya penyekatan oleh Kepolisian, Perhubungan, dan Satpol PP sudah sangat baik. Operasi ini akan berakhir tanggal 7 Juni,” kata Dirjen Budi saat menggelar rapat koordinasi di Polresta Cirebon di Pos Losari-Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Kegiatan koordinasi yang dijalin oleh Ditjen Hubdat dengan sejumlah jajaran Polres di Jawa Barat dan Jawa Tengah ini juga dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan penyekatan terhadap upaya mudik maupun balik oleh masyarakat sehingga dapat menyaring jumlah kendaraan yang menuju Jakarta.

“Kami sadar bahwa Polisi juga adalah ujung tombak di lapangan jadi kami sampaikan salam dari Menteri Perhubungan yang menyatakan apresiasi

dan rasa terima kasih atas kerja keras yang dilakukan. Melalui keterbatasan kondisi ini saya tahu bahwa tim penanganan Covid-19 di daerah-daerah telah bertugas semaksimal mungkin,” jelasnya.

Selama operasi ini menurutnya sebagian besar masyarakat sudah punya kesadaran untuk tidak mudik. “Kemungkinan yang mudik adalah profesi yang dari sektor informal karena tidak ada kegiatan ekonomi dan memilih kembali. Hari ini saya memotivasi kembali kepada para rekan-rekan yang bertugas untuk tetap tegas dan menahan masyarakat yang tidak lengkap persyaratannya untuk tidak melintas,” tambah Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi, bentuk koordinasi yang dijalin dengan pihak Kepolisian di daerah-daerah juga karena keberhasilan upaya pencegahan mudik dan balik masyarakat bergantung dari Kepolisian. “Ditjen Hubdat yang akan membuat regulasi atau ketentuan atas kegiatan yang dilakukan di lapangan. Namun pelaksanaannya di lapangan adalah polisi dengan dibantu Dinas Perhubungan. Jadi saya pun pastikan untuk selalu berkomunikasi dengan Kakorlantas,” ucap Dirjen Budi.\*

UMUM

**BANTUAN MASKER DAN DISINFECTAN DARI ALFAMART**



Kementerian Perhubungan menerima bantuan berupa masker dan disinfektan dari Alfamart pada Jumat (3/4). Sejumlah 20.000 masker beserta cairan disinfektan tersebut diserahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepedulian Alfamart terhadap kondisi negara dan bangsa kita. Saat ini operasi kita adalah untuk kemanusiaan. Bantuannya tidak hanya ini saja,

tapi juga akan menyusul jenis bantuan lain. Bantuan ini nanti akan kami serahkan kepada Kepala Biro Umum Kementerian Perhubungan, Agung Raharjo. Saya minta untuk kepentingan internal juga untuk anggota yang di terminal, jembatan timbang, dermaga, pelabuhan, stasiun, maupun bandara,” kata Dirjen Budi saat menerima sumbangan tersebut.

Menurutnya dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, butuh keterlibatan masyarakat yang mampu untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu, setidaknya minimal untuk di lingkungan sekitar. “Targetnya adalah membantu masyarakat yang tidak mudik salah satunya juga karena mendukung imbauan pemerintah untuk tidak mudik. Harapan dari kami adalah untuk menyampaikan pesan bahwa masih banyak masyarakat yang peduli tapi mungkin banyak yang tidak dapat mengoordinir bantuan,” tambah Dirjen Budi.

Mewakili direksi Alfamart, Solihin menyampaikan bahwa pihaknya menyumbang ini untuk kegiatan Kementerian

Perhubungan Peduli. “Pendistribusian masker sebanyak 20.000 pcs akan diatur oleh pihak Kemenhub sesuai dengan sasarannya. Kerja sama dengan Kemenhub akan terus kami tingkatkan. Ini adalah awal, kami terus berupaya semaksimal mungkin. Ke depannya juga akan ada paket sembako yang akan diserahkan melalui Kemenhub,” jelas Solihin.



Dalam keterangan yang disampaikan melalui acara tersebut, Dirjen Budi menjelaskan bahwa kegiatan Kemenhub Peduli saat ini dilakukan dengan membagi nasi bungkus gratis. “Sudah 4 hari berlangsung dan diharapkan dapat berlangsung hingga masa krisis ini berakhir. Hingga saat ini telah terkumpul dana hingga Rp.157 juta. Bantuan disalurkan pada pengemudi ojol, bajaj, dan masyarakat sekitar,” urainya.\*

ANGKUTAN

**KEMENHUB SIAPKAN REGULASI UNTUK MENDUKUNG KESELAMATAN PESEPEDA**



Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda maka dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR.

ANGKUTAN

**PELUANG DAN KONDISI TRANSPORTASI DAN LOGISTIK SELAMA PANDEMI**



Menyikapi kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, tentu banyak perubahan yang terjadi. Dalam sektor transportasi maupun logistik, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani mengatakan tujuan untuk bertahan dalam kondisi pandemi adalah salah satu hal krusial. “Saya yakin kalau angkutan penumpang orang masih dapat menunda perjalanannya. Tapi di logistik kita tahu semua untuk produksi tidak dapat ditunda oleh sebab itu kami semua sedang melakukan digitalisasi di angkutan logistik dan angkutan penumpang. Kita sudah berkesimpulan bahwa pemerintah mendukung angkutan logistik dan tidak ada hambatan untuk angkutan logistik selama masa pandemi Covid-19 ini,” jelas Ahmad Yani pada Jumat (17/4).

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” demikian dijelaskan Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemanul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat kes-

elamatan lainnya oleh pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.\*

di tiap wilayah di Indonesia,” tambah Yani.

Hermawan Kartajaya, *Founder* dan *Chairman* MarkPlus, Inc. sebagai pemateri sekaligus tuan rumah dalam diskusi ini menyatakan, “Pada 3 April yang lalu saya selalu mengatakan jangan cuma *surviving* Corona tapi juga *preparing the post*. Baik industri yang *growing* maupun *storming*. Beberapa bisnis ini mendadak banyak yang berubah karena banyak orang yang tidak berani keluar rumah sehingga semua tergantung *delivery*. Jadi kuartal 1 dan kuartal 2 ini *surviving* tapi sekaligus harus persiapan untuk pasca Covid-19,” jelasnya saat membuka diskusi.

Diskusi ini juga membahas bagaimana peluang yang dapat diraih sektor logistik mengingat ada jaringan distribusi yang bertumbuh karena teknologi dengan menghadirkan sistem jasa antar, terlebih dengan adanya industri *e-commerce* atau hadirnya sistem belanja online yang semakin digemari kala keterbatasan selama masa karantina.

“Saya menyebutnya sektor yang terkena *windfall*. Di saat sektor lain kesulitan, logistik seharusnya menikmati karena kebiasaan masyarakat berubah. Peran logistik menjadi penting. Tapi harus diingat, walau bisnis berpotensi bagus tetap harus bersiap kalau COVID-19 ini selesai. Sekarang menikmati belum tentu setelah COVID-19 menikmati. Tetap harus ada *preparing*, atau mempersiapkan,” ujar Hermawan.\*

BPTD

## FASILITASI KEPULANGAN WNI, BPTD IV RIAU KEPRI SIAPKAN 4 UNIT BUS



Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau Provinsi kepulauan Riau (BPTD IV Riau-Kepri) siapkan 4 unit bus untuk memfasilitasi kepulangan WNI asal Malaysia yang datang melalui Pelabuhan Pelindo I Dumai.

Kesiapan ini diungkapkan Kasi LLAJ BPTD IV Riau-Kepri, Efrimon kepada Madaniy, usai memastikan kesiapan kendaraan angkut tersebut di Terminal Tipe A Dumai. "Kami Informasi awal yang kami peroleh dari manifest penumpang, ada 164 orang WNI yang akan datang hari ini, ternyata ada 12 orang tujuan Sumbar tak jadi berangkat, total seluruhnya 163 orang," kata Efrimon.

Sesuai dengan tugas yang diberikan Komando Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Riau, BPTD IV Riau-Kepri bertanggungjawab untuk memfasilitasi pemulangan WNI untuk tujuan diluar Provinsi Riau.

"Sejauh ini kami mencatat ada sekitar 146 orang WNI yang akan kami pulangkan ke sejumlah provinsi, seperti Sumbar, Sumut, Jambi, Lampung dan Jawa Timur, untuk itu kami sudah siapkan 4 unit bus," kata Efrimon.

Untuk memastikan kondisi kendaraan, sesuai dengan SOP Kementerian Perhubungan, petugas Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) BPTD IV telah melaksanakan rampcheck terhadap semua kendaraan tersebut, dan dinyatakan siap. Rincian WNI di Malaysia yang pulang ke Indonesia melalui pelabuhan Dumai sebagai berikut, 14 orang tujuan Riau, 99 orang tujuan Sumbar, 27 tujuan Sumut, 17 orang ke Jambi, 2 orang ke Lampung akan diantar menggunakan moda transportasi darat sedangkan 1 warga Jombang Jawa Timur akan difasilitasi dengan menggunakan angkutan udara melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. (\*)



## KOMISI V DPR-RI DUKUNG KEBIJAKAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi para pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI yang telah memahami dan mendukung kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait Pengendalian Transportasi pada masa Wabah Covid-19.

"Saya mengapresiasi para anggota Komisi V DPR-RI yang telah memahami dan mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka melakukan pengendalian transportasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Bahwa Peraturan Menhub tidak ada yang multitafsir dan tidak ada pertentangan antara Permenhub atau SE Dirjen dengan SE Gugus Tugas," demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komisi V DPR-RI, Senin (11/5).

Menhub Budi Karya menjelaskan, tidak benar bahwa tidak ada koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah di dalam pembuatan aturan terkait pengendalian transportasi. Menhub mengungkapkan, pihaknya telah melakukan serangkaian koordinasi dengan berbagai sektor terkait dalam menyusun maupun menetapkan Peraturan terkait pengendalian transportasi pada masa wabah Covid-19.

"Walapun dari rumah, kami koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah. Saya kontak Gubernur-Gubernur supaya ada suatu emosional feeling yang baik, agar kebijakan ini berjalan dengan lancar," ungkap Menhub.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus mengatakan, pada situasi pandemi Covid-19, Kemenhub berada di bawah koordinasi dari Gugus Tugas yang menjadi *leading sector* penanganan wabah Covid-19. "Menhub ada di bawah koordinasi atau perintah dari Gugus Tugas. Kita harus luruskan ini. Kemenhub hanya menjalankan apa

yang diarahkan Presiden melalui Gugus Tugas," ungkap Lasarus.

Lebih lanjut Lasarus memberikan masukan kepada Kemenhub untuk melakukan evaluasi dari penerapan aturan yang mengecualikan orang-orang yang memiliki kriteria dan syarat tertentu untuk bepergian pada masa wabah Covid-19.

"Pak Menhub harus lakukan evaluasi implementasi aturan ini. Keselamatan jiwa jauh lebih penting dari segalanya. Kalau ternyata tidak baik dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 tentunya kebijakan ini perlu dievaluasi kembali," jelas Lasarus.

Menanggapi hal itu, Menhub Budi Karya mengatakan, telah menindaklanjuti arahan dari Komisi V DPR RI untuk melakukan evaluasi-evaluasi dari implemenasi kebijakan pengendalian transportasi.

"Seperti misalnya adanya kedatangan para pekerja WNI dari luar negeri di Bandara Soekarno Hatta. Saya sampaikan usulan agar pihak Angkasa Pura II membantu mengawasi protokol kesehatan yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandara yang kekurangan petugas sehingga sempat terjadi antrian panjang pada 7 Mei lalu. Hari ini dilaporkan ada 7 flight dan 1300 orang WNI yang datang di Bandara Sokerno Hatta. Mudah-mudahan setelah ada tambahan personel kesehatan tidak terjadi antrian lagi. Jadi self correction dan perbaikan terus kami lakukan," tutur Menhub Budi.

Selain ketua Komisi V DPR-RI, sejumlah anggota juga telah memahami dan mendukung kebijakan Kemenhub terkait dengan pengendalian transportasi pada masa wabah Covid-19. Menhub Budi pun menerima segala masukan dan kritikan yang konstruktif dari para anggota Komisi V DPR-RI. (\*)



Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti; Kakorlantas, Istiono; Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi; dan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, pada saat pelepasan Angkutan AKAP Terbatas bagi penumpang dengan persyaratan khusus yang melakukan perjalanan ke luar daerah, Terminal Pulo Gebang, Jakarta, 9 Mei 2020.



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, memeriksa kendaraan yang hendak melintas keluar Jakarta di Check Point Tol Cikarang Barat, 22 Mei 2020. Pemerintah melarang masyarakat untuk mudik demi menekan penyebaran Covid-19.



► Pengawasan kendaraan yang melintas di perbatasan Bekasi-Karawang serta KM 47 Tol Jakarta-Cikampek, 28 Mei 2020.



▼ Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, bersama Kadishub DKI, Syafrin Liputo, memeriksa dokumen perjalanan kendaraan yang melintas di perbatasan Bekasi-Karawang serta KM 47 Tol Jakarta-Cikampek, 28 Mei 2020.



◀ Sesditjen Perhubungan Darat, Imran Rasyid menyaksikan kegiatan *Rapid test* atau pemeriksaan cepat COVID-19 secara *drive thru* di halaman depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, 20 April 2020.



▼ Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, bersama Kakorlantas Polri, Istiono, dan Kepala BPTJ, Polana, mendampingi Menko Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan, di pos pemeriksaan kendaraan mudik, Pintu Tol Cikarang Barat, 24 April 2020.



◀ Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, ketika memantau pos Check Point di KM 47 Tol Jakarta Cikampek, 31 Mei 2020.

▼ Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti memberi penjelasan kepada awak media terkait kondisi lalu lintas di Pos Check Point KM 47 Tola Jakarta Cikampek, 31 Mei 2020.



◀ Kunjungan Kerja Dirjen Perhubungan Darat ke Polres Purbalingga, 31 Mei 2020.



► Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, sedang memberikan penjelasan kepada media terkait kunjungan kerjanya di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, 17 Juni 2020. Persyaratan SIKM bagi masyarakat yang hendak keluar masuk Jakarta sangat ampuh membatasi pergerakan masyarakat.



► Dirjen Perhubungan Darat memantau prosedur pengecekan protokol kesehatan di Pos Ojol, Jakarta, 17 Juni 2020. Pada masa pandemi ini, ojek dan taksi online diizinkan mengangkut penumpang dengan penerapan protokol kesehatan, diantaranya dengan pemasangan sekat pelindung.



► Kunjungan Kerja Dirjen Perhubungan Darat meninjau Pos Pengamanan Cisarua, Bogor, 7 Juni 2020.

